

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAN KESIAPAN SEKOLAH MENGENAI PELAKSANAAN KURIKULUM MERDEKA
DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN REJANG LEBONG**

TESIS

Di ajukan Unt uk M emenuhi Sal ah Sat u Syarat
M e mperoleh Gel ar Magister Pendi di kan (MPd)
Progr a m St udi M anaj e men Pendi di kan Isl a m



Na ma : FETI IIN PARLI NA

NI M : 21861008

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feti Iin Parlina
NIM : 21861008
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 02 Mei 1991

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Kesiapan Sekolah Mengenai Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Rejang Lebong*, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, 10 Agustus 2023

Saya yang menyatakan



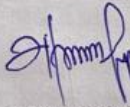
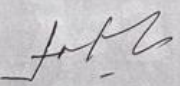

FETI IIN PARLINA

NIM. 21861008

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Kesiapan Sekolah Mengenai Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Rejang Lebong,” yang di tulis oleh saudara **Feti Iin Parlina**, NIM 21861008, Program Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji tesis.

Curup, Agustus 2023

Ketua, Dr. Abdul Sahib, M.Pd.I NIP. 19720520 200312 1 001	Sekretaris / Pembimbing II,  Dr. Emmi Kholilah Harahap, M.Pd.I NIP. 19900603 202012 2 004
Penguji Utama,  Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd NIP. 19751108 200312 1 001	Tanggal 16/8-2023
Penguji I / Pembimbing I,  Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP. 19650826 199903 1 001	Tanggal 16/8-2023



HALAMAN PENGESAHAN
No: /In.34/PS/PP.00.9/08/2023

Tesis yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Kesiapan Sekolah Mengenai Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Rejang Lebong* yang di tulis oleh saudara **Feti Iin Parlina**, NIM. 21861008, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 10 Agustus 2023 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua, Dr. Abdul Sahib, M.Pd.I NIP. 19720520 200312 1 001	Sekretaris / Pembimbing II, Dr. Emmi Kholilah Harahap, M.Pd.I NIP. 19900603 202012 2 004
Penguji Utama, Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd NIP 19751108 200312 1 001	Tanggal 16/8-2023
Penguji I / Pembimbing I, Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP. 19650826 199903 1 001	Tanggal 16/8.2023
Mengetahui: Rektor IAIN Curup Prof.Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415 200501 1 009	Curup, 10 Agustus 2023 Direktur Pascasarjana IAIN Curup Dr. H. Sutatto, M.Pd. NIP 19740921 20003 1 003

ABSTRACT

Feti Iin Parlina, N M 21861008. *Implementation of Government Policy and School Readiness Regarding the Implementation of Merdeka Curriculum at Junior High School Level Rejang Lebong Regency*, thesis, Postgraduate Program of IAIN Curup, Islamic Education Management Study Program 2023, 106 pages.

After the world of education underwent changes after the covid 19 virus hit, the education curriculum in Indonesia was perfected through the Merdeka Curriculum. Not all schools implement it, only some schools which were approved as Sekolah Penggerak. This implementation is based on the government policies and school readiness. It is the reason why this research was carried out. This study aims to describe the policies and implementation of the Merdeka Curriculum at Sekolah Penggerak in Rejang Lebong Regency.

This research is descriptive qualitative research. The data was taken from Sekolah Penggerak. The data was collected by interview, documentation and observation. The collected data is reduced, analyzed, and concluded. This research was conducted at three junior high school in Rejang Lebong which were representatives of the seven schools that became Mobilizing Schools.

The conclusions are 1) The regional government's policy is based on the decision of the Central Government. The regional government always guides and evaluates the implementation of it. Meanwhile, the Regional Government through the Rejang Lebong Education and Culture Office, has prepared a draft that regulates the implementation of it in 2024. 2) The government provides Performance BOS, guidance and training. Schools can use local wisdom Merdeka Mengajar Platform as a space for sharing knowledge and seeking inspiration to create innovation. The implementation of the policy regarding the Merdeka Curriculum is an extension of the Central Government's policy by collaborating with IAIN Curup. Schools also become more creative and innovative so that they can implement the project of Pancasila Student Profile Strengthening, receive BOS Performance, attend workshops, prepare supporting facilities such as internet networks, learning modules and demands for supporting resources.

Key words: Policy, Merdeka Curriculum

1. Bapak Prof. Dr. Idi Wirsah, MPd.I. sebagai Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Sutarto, S. Ag., MPd. sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Curup, yang telah memberikan izin dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Pascasarjana IAIN Curup.
3. Bapak Prof. Dr. Mirni Yanto, MPd. sebagai Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
4. Bapak Prof. Dr. Hendra Harni, MPd. sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Curup sekaligus sebagai Penguji Utama dalam penulisan Tesis ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. Hengky Wono, M.Pd selaku pembimbing pertama dalam penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Emmi Kholilah Harahap, M.Pd.I selaku pembimbing kedua dalam penulisan tesis ini.
7. Seluruh dosen pada program Pascasarjana IAIN Curup.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong yang telah merekomendasikan untuk pelaksanaan penelitian.
9. Kepala Sekolah SMPN 4 Rejang Lebong, SMPN 7 Rejang Lebong, dan SMPN 23 Rejang Lebong beserta para guru yang menjadi lokasi penelitian dan telah memberikan banyak informasi terkait permasalahan yang diteliti.
10. Terima kasih untuk orang yang paling istimewa yaitu Suami dan Ibu yang telah memberikan doa serta dukungan moral dan materi.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	Error! Bookmark not defined
ABSTRAK	v
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah	1
B Fokus Penelitian	8
C Pertanyaan Penelitian	8
D Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN	11
A Kajian Teori	11
1. Konsep Kurikulum Merdeka	11
2. Kesiapan Sekolah	28
3. Implementasi Kurikulum Merdeka	33
B Penelitian yang relevan	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A Jenis Penelitian	39
B Tempat Penelitian	40
C Waktu Penelitian	43
D Jenis dan Sumber Data	43
E Teknik Pengumpulan Data	45
F Keabsahan Data	46
G Teknik Analisis Data	46
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian	49
1. Profil SMPN 4 Rejang Lebong	49
2. Profil SMPN 7 Rejang Lebong	51
3. Profil SMPN 23 Rejang Lebong	51
B Hasil Penelitian	52
1. Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Kurikulum	52
2. Kesiapan Sekolah terhadap Pelaksanaan Kurikulum Merdeka	65
3. Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Kurikulum Merdeka	74

C	Pe nbahasan	81
BAB V	PENUTUP	88
A	Kesi mpul an	88
B	I mpli kasi	90
C	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

A Latar Belakang Masalah

¹ Abd. Aziz, *Orientasi Sistem Pendidikan Agama di Sekolah*, (Yogyakarta: Teras, 2010)
² Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*,
(Bandung: Gtra Unbar, 2003)

³ Nurchaili, *Membentuk Karakter Siswa Melalui Keteladanan Guru*, (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol.16), h 234.

⁴ Fari d Abdul Khali q, *Fikih Politik Islam* terje nahan Fat urrah man A Ha ni d, (Jakarta: Anzah, 2005), h 63

⁵ Ahmad Nur Fuad dkk, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam* (Malang: Madani, 2010), h 84

⁶ Rahimah, R. *Peningkatan Kemampuan Guru SMP Negeri 10 Kota Tebingtinggi Dalam Menyusun Modul Ajar Kurikulum Merdeka melalui Kegiatan Pendampingan Tahun Ajaran 2021/2022.*, (ANSIRUPAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam 2022) h. 92

⁷ Merta Sari, N K L *Pengembangan Bahan Ajar Embroidery Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka*, (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2021), h 5

B Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini hanya akan difokuskan kepada dasar kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka pada Tingkat Sekolah jenjang SMP, serta kesiapan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka tersebut dan implementasinya di sekolah.

C Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka?
2. Bagaimana kesiapan sekolah mengenai pelaksanaan Kurikulum Merdeka di tingkat SMP di Kabupaten Rejang Lebong?

3. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah mengenai Kurikulum Merdeka di tingkat SMP di Kabupaten Rejang Lebong?

D Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui kebijakan Pemerintah mengenai pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada tingkat SMP.
- b. Menjelaskan kesiapan sekolah mengenai pelaksanaan Kurikulum Merdeka di tingkat SMP Kabupaten Rejang Lebong.
- c. Mendeskripsikan implementasi kebijakan Pemerintah tentang Kurikulum Merdeka di tingkat SMP di Kabupaten Rejang Lebong.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam upaya pelaksanaan Kurikulum Merdeka khususnya di tingkat SMP.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

- (2) Para kepala sekolah SMP sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka secara maksimal.
- (3) Peneliti sendiri untuk mendapatkan pengalamanan tentang kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

A Kajian Teori

1. Konsep Kurikulum Merdeka

⁸ Nasution, S *Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Gtra Aditya Bakti, 1991), Cetakan ke-4, h 98

⁹ Nzar, Sya msul. *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: G putat Pers, 2002), Cetakan ke-1, h 102

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gra media Pustaka U a ma, 2008), h 45

¹¹ Abu Ah madi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: R neka G pta, 1991), h 73

^{1 2} Kusnohadi, Widyaiswara LPMP Jawa Timur, *Esensi Merdeka Belajar yang Sebenarnya*, 2020

a) Beragam tempat dan waktu

Dalam menjalankan proses belajar tidak hanya dibatasi oleh ruang misalnya hanya di kelas saja, namun juga diluar kelas.

b) *Free choice*

Peserta didik dapat mempraktekkan cara belajar sesuai dengan yang ia rasa paling nyaman. Sehingga diharapkan peserta didik dapat terus mengasah kemampuannya.

^{1 3} Kemendikbud, *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Edisi ke-3 (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI, 2020)

^{1 4} Iwinsah, *Menakar Konsep Merdeka Belajar*. 2020. Intrens News. Available at: <https://intrens.news/menakar-konsep-merdeka-belajar/>. (diakses tanggal 25 September 2022)

c) *Personalized learning*

Guru dapat menyesuaikan dengan peserta didik dalam memahami materi, memecahkan jawaban sesuai dengan kemampuan peserta didik, ini ini berat bermain game. Dimana bila dia mampu untuk memecahkan suatu tantangan maka ia akan cepat naik level jadi bukan lagi memakai sistem pukulan rata kemampuan peserta didik.

d) Berbasis proyek

Peserta didik diajak untuk dapat menerapkan keterampilan yang ia sudah pelajari di berbagai situasi. Pengalaman ini akan sangat terasa untuk kelak diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari.

e) Pengalaman lapangan

Match and Link pada dunia pekerjaan itu sangatlah penting. Pada saat ini materi yang telah diberikan kepada peserta didik tidak ada kaitannya dengan dunia kerja. Maka adanya pengalaman lapangan dapat membantu peserta didik untuk dapat lebih efisien dalam dunia pekerjaan.

f) Interpretasi Data

Peserta didik akan mendapatkan banyak sekali informasi. Diharapkan dengan banyaknya informasi yang masuk dapat menyelesaikan masalah kebutuhan, dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan dan lain-lain.

Dalam upaya menunjang terselenggaranya kurikulum merdeka belajar, maka Kemendikbud merumuskan empat kebijakan sebagai fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia, yaitu¹⁵

- (1) Proses penilaian USBN komprehensif yaitu penyelenggaraan USBN (Ujian Sekolah Berbasis Nasional) akan dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Dalam proses penilaian, pihak sekolah dapat melakukan ujian secara tertulis maupun lisan, atau bisa menggunakan pembuatan karya tulis maupun pengumpulan portofolio. Sehingga pihak sekolah mampu menyusun dan memiliki wewenang sesuai kebijakan yang tentunya mendukung proses pengetahuan anak.
- (2) Ujian Nasional (UN) akan diubah menjadi *Asesmen Minimum dan Survei Karakter* yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter. Proses ujian pun akan dilaksanakan pada tengah jenjang pendidikan, misalnya pada kelas 4 SD, 8 SMP, 10 SMA. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi pembelajaran pada jenjang pendidikan yang akan dilaksanakan guru atau pendidik.
- (3) Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dalam proses penyusunan RPP Kemendikbud memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan ini guru secara bebas dapat memilih,

¹⁵ Iwinsah, *Menakar Konsep Merdeka Belajar*. 2020. Intens News. Available at: <https://intens.news/menakar-konsep-merdeka-belajar/>. (diakses tanggal 25 September 2022)

membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

- (4) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terjadi perubahan komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50% jalur afirmasi minimal 15% dan jalur perpindahan maksimal 5%. Kemudian pada jalur prestasi atau sisa 0-30% lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah kota masing-masing. Setiap daerah memiliki otonomi kebijakan untuk menentukan komposisi akhir dari zonasi sehingga pemerataan serta mutu kualitas anak didik dan guru berkembang.

a) Mandiri Belajar

Satuan pendidikan menerapkan beberapa prinsip Kurikulum Merdeka dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, namun tetap menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan.

b) Mandiri Berubah

Menggunakan Kurikulum Merdeka dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkannya dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen.

c) Mandiri Berbagi

Menggunakan Kurikulum Merdeka dalam mengembangkan satuan pendidikannya dan menerapkannya dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain.

¹⁶ Merdeka Mengajar, <https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/6824815789465-Kebijakan-Pemerintah-Terkait-Kurikulum-Merdeka>, (diakses tanggal 25 September 2022)

¹⁷ Hadiansah, Deni. *Implementasi Program GLS Dalam Memperkuat Ekosistem Sekolah Literasi Pada SMP Negeri Kota Bandung*. Disertasi Sekolah Pascasarjana UNNUS, 2022

- a) Aliran progresi vis mē, mē mandang pēnbelajaran ditekankan pada pēnbentukan kreatifitas, pēnberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah (*natural*) dengan mēperhatikan pengalaman peserta didik, sehingga diharapkan dapat tercipta perubahan pada diri peserta didik dengan indikator adanya perkembangan tingkat kemajuan baik dalam bentuk pemikiran maupun sikap.
- b) Aliran konstruktivis mē melihat pengalaman langsung peserta didik (*direct experience*) sebagai kunci dalam pēnbelajaran. Menurut aliran ini pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Aliran ini mēiliki kesamaan dengan aliran empiris mē yang mēngatakan bahwa

^{1 8} Wedarti. *Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah*. (Jakarta: Kemendikbud RI, 2019)

sumber pengetahuan adalah pengalaman (*aposterior*) panca indra. Pengetahuan terbentuk karena pemanfaatan panca indra melalui mata untuk melihat, hidung mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk merasa, dan kulit untuk meraba dari pengalaman-pengalaman indra itulah kemudian manusia belajar sehingga menghasilkan suatu pengetahuan dan pengalaman.

- c) Aliran humanisme melihat peserta didik dari segi keunikan/karakteristik, potensi dan motivasi yang dimilikinya. Suatu pembelajaran akan berhasil jika dapat menciptakan perubahan pada diri peserta didik, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik yang memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda.
- d) Filsafat antropologis, memandang bahwa manusia adalah makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila dan makhluk religi.

(1) Manusia sebagai makhluk individu

Dalam pandangan filsafat antropologi bahwa setiap manusia tidak sama dengan orang lain sekalipun identik. Dengan demikian kegiatan pembelajaran sebagai bagian dari sistem pendidikan harus menghargai atau melihat keunikan setiap manusia. Wujud konkrit dari penghargaan ini adalah penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat dan minat positif dalam diri setiap peserta didik.

Hakikat manusia sebagai makhluk individu berimplikasi pada penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

- 1) Guru/dosen diharapkan sebagai subjek yang benar-benar berbakat dan berminat menjadi guru/dosen, serta mengajar pelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya.
 - 2) Tujuan dan isi pendidikan berupa aneka mata pelajaran / mata kuliah, sehingga dapat mengakomodir keanekaragaman bakat dan minat peserta didik. Dalam hal ini satuan pendidikan menyusun kurikulum dengan mengalokasikan sejumlah mata pelajaran / mata kuliah pilihan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih mata kuliah sesuai dengan keinginannya tapi dalam batas-batas tertentu.
 - 3) Strategi pembelajaran diharapkan guru /dosen dapat menggunakan aneka metode dan media pembelajaran, sehingga dapat mengakomodir keanekaragaman cara belajar siswa / mahasiswa.
 - 4) Penilaian dan evaluasi pembelajaran diharapkan guru /dosen dapat menilai dan mengevaluasi kemajuan belajar serta didik/mahasiswa sesuai kapasitas potensi akademik yang dimilikinya.
- (2) Manusia sebagai makhluk sosial

Pandangan tentang hakikat manusia sebagai makhluk sosial dalam konteks pembelajaran akan berimplikasi terhadap semua unsur pendidikan.

(3) Manusia sebagai makhluk Susila

Dalam pandangan hakikat manusia sebagai makhluk susila mempunyai implikasi terhadap semua unsur pendidikan.

(4) Manusia sebagai makhluk beragama

Pandangan tentang hakikat manusia sebagai makhluk beragama mempunyai implikasi terhadap semua unsur pendidikan, diantaranya:¹⁹

- 5) Dosen diisyaratkan sebagai orang yang percaya akan adanya Tuhan (*Theis*) atau hidup beagama, sekalipun berbeda agama atau beda dalam penyebutan nama Tuhannya.
- 6) Mahasiswa telah diisyaratkan diarahkan untuk menentukan pilihan agama yang diyakininya.
- 7) Tujuan dan isi pendidikan diharapkan pada kurikulum perguruan tinggi tersedia tujuan dan isi pendidikan ketuhanan atau mengenai agama sesuai ajaran agama yang dianut manusia / masyarakat tempat satuan pendidikan berada.
- 8) Strategi pendidikan, cara-cara pendidikan ketuhanan seperti teladan, penalaran, perintah, hadiah, nasihat, larangan dan hukuman digunakan secara proposional, sinergi dan konsisten.
- 9) Evaluasi pendidikan yang dilakukan terhadap perkembangan keagamaan dalam diri mahasiswa secara proposional.

¹⁹ Yoru Media, *Pengertian Kurikulum Merdeka Belajar, Latar Belakang, Keunggulan dan Perbedaan dengan Kurikulum Sebelumnya*. <https://www.yoru.my.id/2022/02/pengertian-kurikulum-merdeka-dan-keunggulannya.html>

Secara konseptual kebijakan merdeka belajar disusun dengan mendasari dan berorientasi pada relevansi pendidikan dengan dunia kerja (*link-and-match*), kurikulum yang berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*), artinya pembelajaran disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi atau sesuai dengan perkembangan kekinian, pembelajaran aktif (*student active learning*), artinya siswa menjadi pusat belajar, penilaian yang valid, utuh dan menyeluruh atas prestasi baik akademik maupun non akademik.

Pelaksanaan kurikulum merdeka tahun 2022 dengan maksud pemulihan pembelajaran, didasarkan pada kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yaitu:

- 1) Perendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022²⁰

Yang memuat tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang Pendidikan

²⁰ Berita Negara, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?nmin=3017, (di akses tanggal 5 Agustus 2023)

2) Per mendi kbudristek Nomor 7 Tahun 2022^{2 1}

Yang memuat standar isi pada pendidikan anak usia dini jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Standar ini dikembangkan melalui rumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan.

Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan:

- 10) Muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 11) Konsep keilmuan
- 12) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

3) Kepmendi kbudristek Nomor 56/ M2020^{2 2}

Pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang memuat tiga opsi kurikulum yang dapat digunakan di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran beserta struktur kurikulum merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen serta beban kerja guru.

^{2 1} Berita Negara, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah,

https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?min=3021, (diakses tanggal 5 Agustus 2023)

^{2 2} Berita Negara, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/ M2020 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran,

https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20220215_093900_Salinan%20Kepmendikbudristek%20No.56%20ttg%20Pedoman%20Penerapan%20Kurikulum.pdf, (diakses tanggal 5 Agustus 2023)

- 4) Keputusan kepala BSKAP Nomor 008/ H KR/ 2022 Tahun 2022^{2 3}

Tentang capaian pembelajaran pada anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada kurikulum merdeka.

- 5) Keputusan kepala BSKAP Nomor 009/ H KR/ 2022 Tahun 2022^{2 4}

Tentang Dimensi, Elemen dan Sub Elemen profil pelajar pancasila dan kurikulum merdeka. Memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama untuk proyek penguatan belajar Pancasila

- 6) Surat Edaran No. 0574/ H HB/ SK 02.01/ 2023^{2 5}

Meningkatkan implementasi Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/ M2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/ M2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran

2. Kesimpulan Sekolah

^{2 3} Kemendikbud, Keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek Nomor 008/ HR/ KR/ 2022 tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka, https://kurikulum.kemendikbud.go.id/wp-content/unduh/CP_2022.pdf, (diakses tanggal 05 Agustus 2023)

^{2 4} Kemendikbud, Keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek Nomor 009/ HR/ KR/ 2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka, https://kurikulum.kemendikbud.go.id/wp-content/unduh/Dimensi_PPP.pdf, (diakses tanggal 05 Agustus 2023)

^{2 5} Kemendikbud, Surat Edaran Nomor 0574/ H HB/ SK 02.01/ 2023 tentang Pendaftaran Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Tahun Ajar 2023/ 2024, https://kurikulum.kemendikbud.go.id/file/1675738974_manage_file.pdf, (diakses tanggal 05 Agustus 2023)

- 1) Kompetensi guru dalam pemahaman substansi bahan ajar/ keilmuan (kompetensi Profesional), yang mencakup penguasaan bidang ilmu yang diajarkan.
- 2) Meningkatkan kemampuan dalam pengembangan pembelajaran (Kompetensi Pedagogik) melalui metode serta cara yang tepat dalam mengkonstruksi ilmu, dengan skill yang membawa pada suasana ilmiah dan *curiosity* siswa dapat meningkat.

Mengutip teori dari Dockett dan Perry, bahwa Konsep kesiapan sekolah sendiri telah menjadi perdebatan para ahli selama bertahun-tahun, dan belum

²⁶ Saetia, *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Gupta, 2013), h. 113

²⁷ Ri as Anoni, *Kesiapan Sekolah Dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Ekonomi*, (Jurnal Pendidikan Ekonomi IKIP Veteran Semarang, 2014)

ada kesepakatan yang pasti tentang definisinya. Hal tersebut disebabkan konsep kesiapan sekolah yang bersifat kompleks dan multidimensional.²⁸

Sedangkan menurut Muhammad Hasbi, Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak. Konsep kesiapan sekolah merupakan bagian dari 3 kesiapan sekolah, yaitu kesiapan anak, kesiapan keluarga, dan kesiapan sekolah. Konsep kesiapan sekolah pada dasarnya menekankan pada kesiapan sekolah untuk menyediakan pengalaman formal di luar rumah, agar anak merasa nyaman dan aman saat menjalankan kegiatannya. Tidak ada lagi perasaan khawatir yang dirasakan anak dan orang tua. Ketika anak berada di sekolah.²⁹

Pada tahun 70-an kesiapan sekolah oleh para ahli lebih dipahami sebagai kesiapan diri siswa baik secara fisik terutama mental, untuk belajar di sekolah. Dalam hal tersebut, yang menjadi fokus dari kesiapan tersebut benar-benar adalah diri siswa saja. Dalam perkembangannya definisi kesiapan sekolah mengalami perkembangan, tidak hanya menyangkut diri siswa saja. Ada dimensi-dimensi tambahan yang berkaitan dengan kesiapan sekolah.

Menurut Habibi yang mengutip dari pendapat Unicef, menyatakan bahwa kesiapan institusi sekolah, yaitu kesiapan lingkungan sekolah dan berbagai perangkat praktis di dalamnya yang dapat mendukung anak untuk melewati masa transisi dari belajar di rumah ke belajar di sekolah secara

²⁸ Lara Fridani, *Kesiapan Sekolah dan Transisi ke Sekolah Dasar (SD) Studi tentang Perspektif dan Praktek Guru*, (Early Childhood Education Journal of Indonesia, 2018)

²⁹ Muhammad Hasbi, dkk, *Panduan Toolkit Kesiapan Sekolah*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), h. 6

bertahap dan halus. Lingkungan sekolah juga harus dapat mendukung semua anak untuk belajar (tidak hanya untuk golongan tertentu saja).³⁰

- 1) Kesiapan satuan Pendidikan memenuhi panduan perencanaan kurikulum Merdeka
- 2) Kesiapan satuan Pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka
- 3) Kesiapan satuan Pendidikan dalam penyediaan buku Teks, akses dan sumber-sumber belajar mandiri,
- 4) Aktivitas komunitas belajar.

- 1) Memahami capaian pembelajaran (CP)
- 2) Merumuskan tujuan pembelajaran
- 3) Menyusun alur tujuan pembelajaran
- 4) Merencanakan pembelajaran dan asesmen

³⁰ Habi bi, *Kesiapan Sekolah Menurut UN CEF*, <http://www.teoriuntukguru.com> (diakses tanggal 5 Agustus 2023)

³¹ Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, *Belajar Melalui Refleksi Kesiapan Implementasi Kurikulum Merdeka: Seberapa Siap Satuan Pendidikan Melakukan Perubahan?*, https://pskp.kemdikbud.go.id/assets/front/images/produk/1-gtk/kebijakan/Risalah_Kebijakan_PSKP_No_6_September_2022_Refleksi_Kesiapan_Implementasi_Kurikulum_Merdeka.pdf, (diakses tanggal 6 Agustus 2023)

³² Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah*, <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/06/Panduan-Pembelajaran-dan-Asesmen.pdf>, 2022, (diakses pada 6 Agustus 2023)

- 1) Memahami garis besar Kurikulum Merdeka
 - (a) Peraturan mengenai kurikulum Merdeka yang berlaku
 - (b) Kajian Akademik Kurikulum untuk pemilihan pembelajaran
- 2) Memahami pembelajaran dan asesmen

Adapun panduan pembelajaran dan asesmen terdiri dari:

- (a) Prinsip pembelajaran dan asesmen
 - (b) Pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik
 - (c) Perencanaan pembelajaran dan asesmen (termasuk alur tujuan pembelajaran)
 - (d) Merencanakan pembelajaran
 - (e) Pengolahan dan pelaporan hasil asesmen
- 3) Memahami pengembangan kurikulum operasional satuan Pendidikan dalam kurikulum Merdeka

Adapun panduan pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan yaitu

- (a) Analisis karakteristik satuan Pendidikan
- (b) Penyusunan visi, misi, dan tujuan satuan Pendidikan
- (c) Pengorganisasian pembelajaran
- (d) Perencanaan pembelajaran

³³ Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah*, <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/06/Panduan-Pembelajaran-dan-Asesmen.pdf>, 2022, (diakses pada 6 Agustus 2023)

- (e) Penda mpi ngan, eval uasi, dan penge mbangan profesi onal
- 4) Me maha ni penge mbangan proyek penguat an profil pel ajar Pancasila

Panduan penge mbangan Pr ojek Penguat an Profil Pel ajar Pancasila
yait u

- (a) Me nyi apkan ekosiste msekol ah
- (b) Me ndesai n proyek penguat an profil pel ajar Pancasila
- (c) Me ngel ol a proyek penguat an profil pel ajar Pancasila
- (d) Me ngol ah ases men dan mel aporkan hasil proyek penguat an profil
pel ajar Pancasila
- (e) Eval uasi dan ti ndak lanj ut proyek penguat an profil pel ajar Pancasila

3. Impl e nent asi Kuri kul um Me rdeka

³⁴ Mil yadi, *Impl e ment asi Kabijakan*, (Jakart a: Bal ai Pust aka, 2015), h 45

- a) Perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan
- b) Perancangan alur tujuan pembelajaran
- c) Perencanaan pembelajaran dan asesmen
- d) Penggunaan dan pengembangan perangkat ajar
- e) Perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila
- f) Implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila
- g) Penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
- h) Keterpaduan penilaian dalam pembelajaran
- i) Pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik (pendidikan dasar dan menengah)
- j) Kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran
- k) Kolaborasi dengan orang tua/ keluarga dalam pembelajaran
- l) Kolaborasi dengan masyarakat/ komunitas/ industry
- m) Refleksi, evaluasi dan peningkatan kualitas implementasi kualitas implementasi kurikulum

³⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 170

³⁶ Badan Standar, *Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Tahapan Implementasi Kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022), h. 5

- n) Penilaian dalam pembelajaran
- o) Kolaborasi dengan orang tua/ keluarga dan masyarakat/ industri

B Penelitian yang relevan

Untuk mendukung penelitian ini sudah ada penelitian lain yang dilakukan yaitu

1. Restu Rahayu, Rita Rosita dan kawan-kawan melakukan penelitian dengan judul implementasi kurikulum merdeka belajar di sekolah penggerak yang memperoleh kesimpulan bahwa implementasi kurikulum merdeka belajar di sekolah penggerak telah dilakukan dengan optimal dan sedang berlangsung. Walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan hambatan. Kunci keberhasilan pelaksanaan kurikulum merdeka belajar di sekolah penggerak adalah dari kepala sekolah dan guru-gurunya yang memiliki ke mauan untuk melakukan perubahan.^{3 7}
2. Ajeng Sestya Ngrum melakukan penelitian dengan judul pengembangan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka belajar (Metode Belajar), metode pembelajaran dalam mengembangkan perangkat pembelajaran untuk pendidikan belajar mandiri. Pendidikan belajar mandiri menjawab kebutuhan sistem pendidikan di era revolusi industri 4.0. Di era revolusi industri 4.0 kebutuhan utama yang ingin dicapai dalam sistem pembelajaran dalam sistem pendidikan.^{3 8}

^{3 7} Restu Rahayu dkk, *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak*, Jurnal Basicedu, <https://jbasic.or.g/i ndex .php/ basicedu/ arti cl e/ vi e w 3237/ pdf> (di akses tanggal 16 September 2022)

^{3 8} Ajeng Sestya Ngrum *Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar (Metode Belajar)*, Jurnal Prosi di ng Pendi di kan Dasar, <https://j our na l. ma hesa ce nte r. or g/i ndex .php/ ppd/ arti cl e/ vi e w 186/ 57> (di akses tanggal 24 Agustus 2022)

3. Dewi Rahmadayanti dan Agung Hartoyo, menulis tentang potret kurikulum merdeka, wujud merdeka belajar di Sekolah Dasar. Kesimpulan yang diperoleh adalah dalam persiapan implementasi kurikulum merdeka, guru perlu mempelajari lebih jauh mengenai kurikulum merdeka agar tercapai capaian belajar yang bermakna, mendalam dan menyenangkan serta pelajar Pancasila yang kompeten.³⁹
4. Dwi Efyanto, dalam tesisnya menuliskan tentang Analisis Kebijakan Merdeka Belajar pada Kurikulum SMK. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya hambatan dalam penerapan kurikulum merdeka belajar. Yaitu pemenuhan kompetensi industry memerlukan peningkatan kompetensi guru yang terprogram guru yang belum mempunyai pengalaman dalam penerapan kompetensi tersebut, adanya perubahan standar kompetensi industry yang dinilai membutuhkan pengembangan kurikulum yang berkelanjutan dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta adanya kesulitan dalam memfasilitasi pembelajaran yang efektif.⁴⁰
5. Nurapni Aulia Sulkipi, dalam penelitian tesisnya tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar terhadap Prestasi Siswa pada SMP Negeri 1 Makassar. Menyimpulkan bahwa adanya implementasi kurikulum merdeka belajar yang optimal yang mampu meningkatkan prestasi siswa, dan ditemukan juga adanya hambatan yaitu budaya belajar. Kunci keberhasilan dari adanya penerapan kurikulum merdeka belajar adalah guru dan siswa

³⁹ Dewi Rahmadayanti, *Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar*, Jurnal Basicedu, <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/3431/pdf> (diakses tanggal 25 September 2022)

⁴⁰ Dwi Efyanto, *Analisis Kebijakan Merdeka Belajar pada Kurikulum SMK*, <https://epri.its.umm.ac.id/82007/1/TESIS-DW%20EFYANTO.pdf> (diakses tanggal 9 Juli 2023)

meningkatkan mindset untuk mau melakukan perubahan sehingga kurikulum merdeka dapat diterapkan secara maksimal. Implementasi kurikulum merdeka belajar juga akan membangun karakter siswa yang kreatif, mandiri, bertanggung jawab, bekerja sama, kritis dan komunikatif.^{4 1}

6. Novritas Suryani, Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak SMAN 10 Kota Jambi. Dalam penelitian tesisnya menyimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada sekolah penggerak SMAN 10 Jambi, dimulai dari perencanaan yang terdiri dari menyusun KOSP (Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan), pembuatan modul ajar, selanjutnya tahap pelaksanaan dimulai pembelajaran Intrakurikuler, dan Pembelajaran melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan terakhir dari implementasi kurikulum merdeka yakni evaluasi yang terdiri dari asesmen, kriteria kenaikan kelas, dan kriteria kelulusan. Hasil penelitian berikut adanya penghambat dari implementasi kurikulum merdeka pada sekolah penggerak SMAN 10 Kota Jambi yakni kurangnya referensi terutama buku paket dan buku penunjang yang terkait dengan kurikulum merdeka, kurangnya pengalaman tenaga pengajar (guru) dalam menerapkan pembelajaran berdeferensiasi dan masih ada guru yang mindset

^{4 1} Nurapni Aulia Sulkipi, *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar terhadap Prestasi Siswa pada SMP Negeri 1 Makassar*, <https://repository.uni-bos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5829/2023%20NURAPNI%20AULIA%20SULKIPLI%204620104052.pdf?sequence=1&allowed=y> (diakses tanggal 9 Juli 2023)

atau cara berpikir tidak berubah, masih ada guru yang mempertahankan gaya mengajar yang tidak mendekatkan siswa.^{4 2}

^{4 2} Nvrita Suryani, *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak SMAN 10 Kota Jambi*, <https://repository.unja.ac.id/43253/1/ABSTRAK%20%281%29.pdf> (diakses tanggal 9 Juli 2023)

A Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan *Field Research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau obyek yang sebenarnya.^{4 3} Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini dapat diarahkan pada latar belakang individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.^{4 4}

Menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.

Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang datanya berupa kata-kata (bukan angka) yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain. Atau penelitian yang didalamnya mengutamakan pendeskripsian secara implementasi

^{4 3} Komarudin, Yooke Tjupar mah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h 115

^{4 4} Lexy J. Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h 89

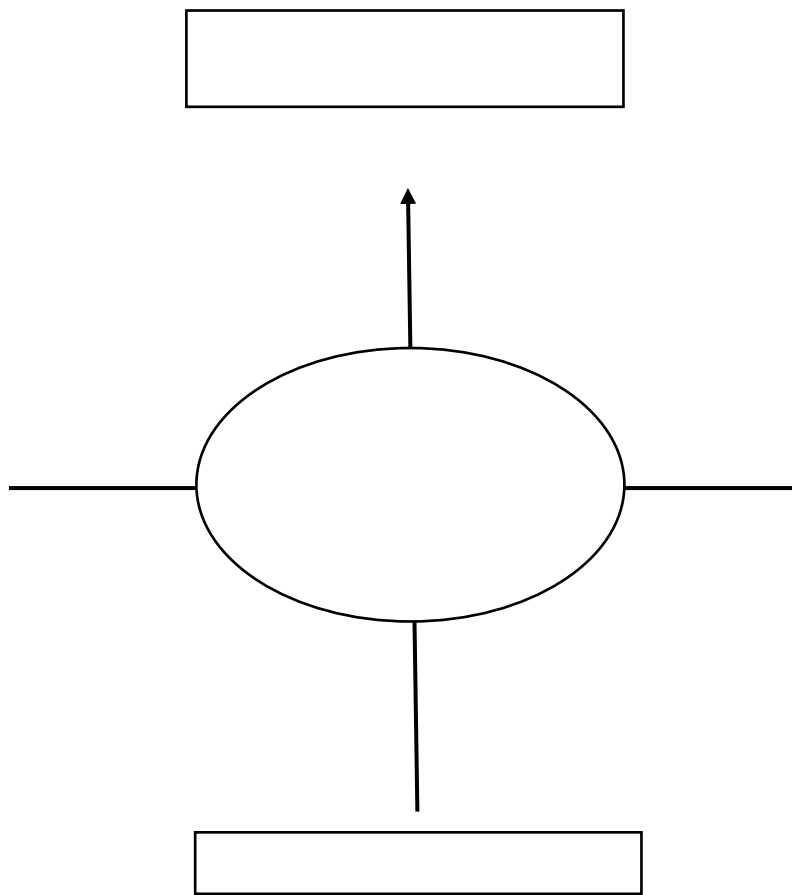
terhadap suatu peristiwa atau proses dalam permasalahan penelitian yang diteliti. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

--	--	--	--



^{4 6} DPMTSP, Peta Administrasi Kabupaten Rejang Lebong
https://dpmptsp.rejanglebongkab.go.id/22853335_119701312129375_3111426628602220117_n/,
 (di akses tanggal 27 Desember 2023)



B Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berlangsung selama lebih kurang 3 bulan, di mulai pada tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 07 Agustus 2023.

C Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis data kualitatif, di mana data kualitatif ini adalah data yang di kumpulkan berupa data dal a mbent uk kat a at au mēndi skri psikan suat u obj ek yang diteliti dari pada pengumpulan berupa angka-angka at au angket. Data yang di kumpulkan mēncangkup wa wancara, cat atan lapangan, fot ografi, dokumen pribadi, mē mo, dan rekaman lain nya.

2. Sumber Data

^{4 7} Lexy J. Møel ong, *Møt odologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda Karya, 2017), h 89

^{4 8} Ari kunt o Suharsi ni, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT R neka G pta, 2010), h 125

- a) Sumber person yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. Dalam penelitian ini sumber person kantor dinas pendidikan Kabupaten Rejang Lebong yaitu Kepala Dinas dan bidang kurikulum
- b) Sumber place yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Dalam penelitian ini sumber place berasal dari aktifitas proses pelaksanaan kurikulum merdeka dan merdeka belajar di SMP Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Sumber paper yaitu data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf dan angka gambar atau symbol lain. Sumber paper dalam penelitian ini berasal dari arsip-arsip data-data tentang sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka belajar di tingkat SMP di Kabupaten Rejang Lebong.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a) Sumber Data Primer

Peneliti memperoleh data secara langsung dan menjadi sumber dari data primer ini adalah kepala dinas dan bagian kurikulum pelaksanaan kurikulum merdeka di SMP Kabupaten Rejang Lebong

- b) Sumber Data Sekunder

Peneliti memperoleh data secara tidak langsung. Data yang diperoleh dari data yang sudah dan mempunyai hubungan dengan masalah yang akan diteliti atau sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- (1) Buku-buku yang berkaitan dengan kurikulum merdeka belajar
- (2) Tabloid yang berkaitan dengan kurikulum merdeka belajar
- (3) Sumber bacaan lainnya.

D Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperoleh maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.⁴⁹

2. Wawancara

Salah satu pengumpulan data ini adalah dengan cara wawancara atau interview yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung pada responden.⁵⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan yang tertulis seperti arsip-arsip, buku dan lain-lainnya, dokumentasi ini biasa

⁴⁹ Ima M Guna wan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013). h. 143

⁵⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit UGM 2010), h. 98

di gunakan untuk mengumpulkan data tentang jumlah penduduk dan letak geografis wilayah penelitian.^{5 1}

Metode ini juga di gunakan mengumpulkan data dan bukti berupa foto, dokumentasi yang bersifat penting seperti dokumen yang berkaitan dengan data-data sekolah, data-data pelaksanaan kurikulum merdeka belajar di SMP Kabupaten Rejang Lebong serta kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan.

E. Keabsahan Data

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat di per mudah di pahami, dan temuannya dapat di informasi kan kepada orang lain.^{5 3} Dalam Menganalisis data yang bersifat kualitatif tersebut

^{5 1} Anas Suji ono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 76

^{5 2} Lexy J. Møel ong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda Karya, 2017), h. 91

^{5 3} Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombi nasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 334

menggunakan teknik Implementasi data di lapangan Model Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut.^{5 4}

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan implementasi data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkuh memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mencarinya bila diperlukan. Jadi reduksi data ini proses menyeleksi, memilih, informasi data, fakta yang objektif untuk digunakan sebagai dasar analisis.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1994) menyatakan 'the most frequent form of display data for qualitative research data in the post has been narrative text'. yang paling sering untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3) *Conclusion Drawing / Verification*

^{5 4} Anrul Hdkk, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia), h 67

Langkah ketiga dalam analisa data kualitatif Miles and Huberman (1994) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berbuah bila tidak di kemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penulis menyimpulkan data dengan kalimat yang sistematis, singkat, dan jelas, yakni dari pengumpulan dan penyajian data yang dilakukan maka penulis memaparkan dan menegaskan dalam bertukar kesimpulan.

A Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian

1. Profil SMPN 4 Rejang Lebong^{5 5}

Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Rejang Lebong terletak di Kawasan pedesaan, Desa Perbo Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dikepalai oleh Ibu Parida Ariani, S.Sos., MPd. Sekolah ini telah berdiri sejak tahun 1979 di mana sejak tahun berdiri hingga sekarang sudah mengalami perubahan nama sekolah sebanyak lima kali, di mana pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1996, sekolah ini bernama SMP Negeri 4 Curup. Pada tahun 1996 sampai tahun 2002, berganti menjadi SLTPN 4 Curup. Pada tahun 2002 sampai dengan 2008, berganti nama lagi menjadi SMP Negeri 4 Curup. Tahun 2008 sampai dengan 2018, berubah menjadi SMP Negeri 1 Curup Utara. Dan terakhir terjadi perubahan lagi pada tahun 2018 sampai sekarang dengan nama SMP Negeri 4 Rejang Lebong.

SMPN 4 Rejang Lebong memiliki Akreditasi A dengan jumlah siswa sebanyak 684 siswa. Di mana pada kelas IX yang terbagi menjadi delapan kelas belajar, memiliki 95 murid laki-laki dan 111 murid perempuan dan berjumlah 206 orang siswa. Dan kelas X berjumlah 238 orang, terbagi menjadi delapan kelas juga, dengan jumlah murid laki-laki

^{5 5} Dokumen SMPN 4 Rejang Lebong

sebanyak 131 orang dan murid perempuan sebanyak 107 orang.
Sedangkan kelas XI sendiri, memiliki delapan kelas, dengan jumlah siswa

laki-laki sebanyak 144 orang dan siswa perempuan 96 orang, dan berjumlah total 240 orang. SMPN 4 Rejang Lebong sendiri memiliki tenaga pengajar sebanyak 46 orang. Dengan jumlah tenaga PNS sebanyak 35 orang dan tenaga Honorer sebanyak 11 orang.

Sekolah ini memiliki Misi yaitu “*Terwujudnya insan yang berprestasi, berkarakter Pancasila, berbudaya lingkungan dan berbasis IT*”. Serta memiliki Misi yaitu 1) mengikuti kompetisi akademik dan non akademik, 2) menanamkan karakter profil pelajar Pancasila (beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, gotong royong kreatif, bernalar kritis dan mandiri), 3) melaksanakan program Jumat bersih, rapi, indah dan asri dan pagelaran seni budaya, 4) meningkatkan dan menerapkan kemampuan insan Pendidikan yang berbasis IT secara holistik.

Sedangkan tujuannya sendiri adalah 1) tercapainya insan yang berkompetensi dalam bidang akademik dan non akademik, 2) terciptanya insan yang religius berdasarkan profil pelajar Pancasila, 3) terciptanya lingkungan yang bersih, rapi, indah, asri dan kelestarian seni budaya, 4) terciptanya insan pendidikan yang mampu menerapkan IT secara holistik.

Adapun sasaran strategis dari SMPN 4 Rejang Lebong adalah menciptakan siswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik (kognitif, afektif, psikomotorik), membentuk generasi muda yang terampil dalam bidang nasihat, qasidah, tilawah, doa harian. Terciptanya lingkungan sekolah yang

bersih rapi, indah dan asri serta berbudaya lingkungan. Serta membentuk insan yang terampil dalam penggunaan IT secara holistik

2. Profil SMPN 7 Rejang Lebong^{5 6}

Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Rejang Lebong beralamat di Jalan Duku Uu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong telah beroperasi sejak tahun 1994 dan sekarang dipimpin oleh Bapak Waminudin, MPd. Sekolah ini memiliki luas tanah 13.024 m², dan luas bangunan 2.680 m². Sekolah ini memiliki akreditasi A dan hanya memiliki murid sebanyak 84 siswa.

3. Profil SMPN 23 Rejang Lebong^{5 7}

- a) Meningkatkan kemampuan praktikal/amal ibadah
- b) Optimalisasi proses belajar mengajar yang mengembangkan kemampuan berbahasa
- c) Mengembangkan kegiatan organisasi kesiswaan yang menumbuhkan sikap siswa untuk bertanggung jawab dan mandiri

⁵⁶ Dokumen SMPN 7 Rejang Lebong

⁵⁷ Dokumen SMPN 23 Rejang Lebong

- d) Mengembangkan kemampuan berkompetensi dalam olahraga
- e) Mengembangkan seni tradisional rabana/ nasyid

B Hasil Penelitian

1. Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka untuk pemilihan pembelajaran dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan berikut:

- a) Permenbudristek Nomor 5 Tahun 2022

Berisi tentang standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang

kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang Pendidikan. Standar Kompetensi Lulusan menjadi acuan untuk Kurikulum 2013, Kurikulum darurat dan Kurikulum Merdeka.

b) Perendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022

Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Standar Isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi sesuai dengan kompetensi Lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan: a) muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, b) konsep keilmuan, c) jalur, jenjang dan jenis Pendidikan. Standar Isi menjadi acuan untuk Kurikulum 2013, Kurikulum darurat dan Kurikulum Merdeka.

c) Perendikbudristek Nomor 262/ M2022

Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/ M2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Muatan struktur Kurikulum Merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta beban kerja guru.

d) Keputusan Kepala BSKAP No mor 008/ H KR/ 2022 Tahun 2022

Capaian pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka. Memuat Capaian Pembelajaran untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam struktur Kurikulum Merdeka.

e) Keputusan Kepala BSKAP No mor 009/ H KR/ 2022 Tahun 2022

Dimensi, Elemen, dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka. Memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama untuk proyek penguatan pelajar Pancasila.

f) Surat Edaran No mor 0574/ H HB/ SK 02.01/ 2023

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No mor 262/ M2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No mor 56/ M2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.

Dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, tidak semua sekolah layak dan bisa menerapkannya. Dikutip dari buku saku *Kurikulum Merdeka* yang diterbitkan Kemendikbud RI, ada beberapa kriteria yang wajib dipenuhi sebuah sekolah agar bisa menerapkan Kurikulum Merdeka, di antaranya adalah:^{5 8}

^{5 8} Nir Hartono, *Kriteria Sekolah Yang Boleh Terapkan Kurikulum Merdeka*, <https://majalahelipsis.com/kriteria-sekolah-yang-boleh-terapkan-kurikulum-merdeka/>, (di akses tanggal 25 Januari 2023)

a) Berminat Menerapkan Kurikulum Merdeka

Yang artinya sekolah tersebut berniat dengan sungguh-sungguh untuk menerapkan Kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Kepala Madrasah/ Sekolah yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka, akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan Kemendikbudristek tentang konsep Kurikulum Merdeka. Konsekuensinya adalah sekolah melalui tenaga kependidikan terutama guru harus mencoba menerapkannya. Mereka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Pada proses ini hanyalah berupa pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi.

b) Memahami dan Mengadaptasi

Kemendikbudristek percaya bahwa kepala sekolah/ madrasah dan guru memiliki kemampuan, komitmen dan sungguh-sungguh bertekad untuk memahami serta mengadaptasi kurikulum dengan konteks sekolah dan kelas masing-masing. Dengan apa yang akan diterapkannya itulah yang akan menjadi kunci keberhasilan.

c) Siap dengan segala kondisi yang ada

Tidak semua sekolah memiliki kesiapan yang sama untuk bisa dianggap mampu menerapkan Kurikulum Merdeka. Hal ini lumrah terjadi karena perbedaan kondisi juga mutu serta kesenjangan yang ada. Untuk itulah Kemendikbudristek menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum berdasarkan hasil survei yang diisi sekolah ketika mendaftar. Sekali lagi, tidak ada seleksi dalam proses

pendaftaran. Kemendikbudristek akan melakukan pertemuan tingkat kesesiapan dan menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan.

d) Menyelenggarakan Pembelajaran yang Inklusif

Sebagai sebuah instrument yang sangat penting kurikulum memiliki kontribusi untuk memunculkan pembelajaran inklusif. Inklusif tidak hanya dalam hal menerima peserta didik, akan tetapi juga kondisi peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Yang dimaksud Inklusif dalam hal ini adalah satuan Pendidikan mampu menyelenggarakan iklim pembelajaran yang menerima dan menghargai perbedaan sosial, budaya, agama dan suku bangsa. Sebuah pembelajaran yang menerima bagaimanapun fisik, agama, serta identitas peserta didiknya. Dalam sebuah kurikulum inklusi dapat tercermin melalui penerapan profil pelajar Pancasila, misalkan dapat dilihat dari dimensi kebhinekaan global dan akhlak kepada sesama.

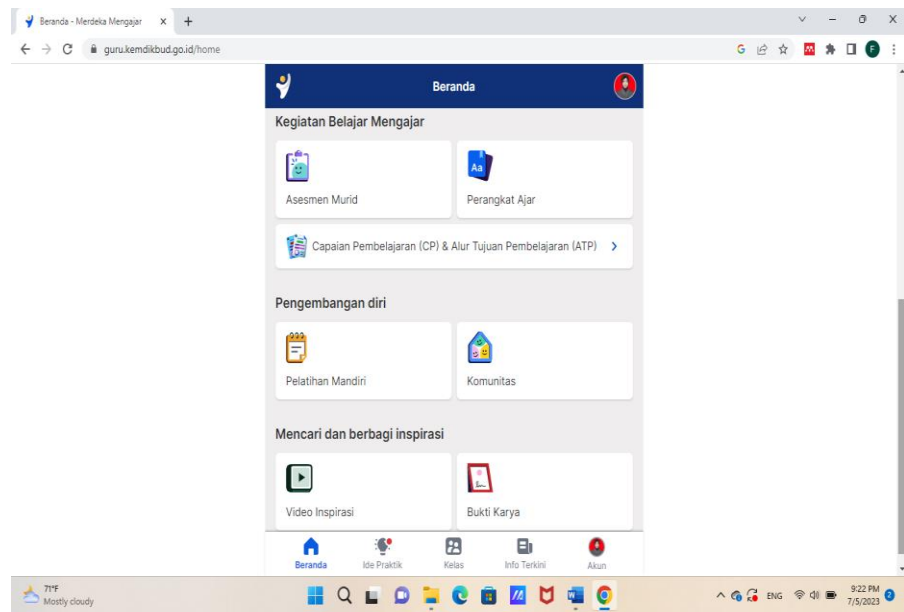
Adapun dasar hukum dalam Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut:

- a) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 UU Sisdiknas mengatur tentang kurikulum. Selain itu, Pasal 39A UU Sisdiknas juga memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan standar nasional Pendidikan, yang mencakup standar isi, standar kompetensi lulusan, dan standar proses.
- b) PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan PP SNP mengatur tentang standar nasional Pendidikan, yang mencakup

standar isi, standar kompetensi lulusan, dan standar proses. Hal ini menjadi dasar untuk pengembangan kurikulum di sekolah-sekolah di Indonesia.

- c) Permenbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Permenbud tersebut mengatur tentang standar proses Pendidikan dasar dan menengah, yang mencakup tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Standar proses tersebut menjadi dasar untuk mengembangkan kurikulum yang mendukung Kurikulum Merdeka.

⁵⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Tahapan Implementasi Kurikulum Merdeka*, <https://kurikulum.deptdiknas.go.id/tahapan-ikm> (di akses tanggal 27 Januari 2023)



⁶⁰ *Aina Mul yana, Ini Kriteria Sekolah yang Dapat Menerapkan Kurikulum Merdeka, <https://www.ainamul yana.com/2022/01/ini-kriteria-sekolah-yang-boleh.html>, (di akses tanggal 25 September 2022)*

^{6 1} Eni Suryani, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP, dalam wawancara di SMPN 4 Rejang Lebong 12 Juni 2023, ijin kutipan telah diberikan

^{6 2} Wani nudin, Kepala SMPN 7 Rejang Lebong, dalam wawancara di SMPN 7 Rejang Lebong 14 Juni 2023, ijin kutipan telah diberikan.

Pe mparan dari Dinas Pendi di kan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, yaitu:

‘Pemerintah menghi nbau agar pada tahun 2024, seluruh sekolah sudah beralih ke Kuri kul um Merdeka semua. Pemerintah Daerah sendiri mendukung, dan sekarang sedang di susun Peraturan Bupati yang me mbahas tentang pelaksanaan Kuri kul um Merdeka. Dal a m Perbup itu akan me mbahas tentang penbiayaan dan juga merancang agar sekolah dapat melaksanakan Kuri kul um Merdeka Berbagi. Di mana sekolah tersebut tidak lagi menggunakan Kuri kul um 13 dan murni menggunakan Kuri kul um Merdeka. Dan sekolah dapat berbagi inspirasi dan motivasi kepada sekolah lain mel al ui Hatfor m Merdeka Mengajar’.^{6 4}

^{6 3} Hizabeth Indri, Kepala SMPN 4 Rejang Lebong dalam wawancara di SMPN 4 Rejang Lebong, 16 Juni 2023, ijin kutipan telah di berikan.

^{6 4} Eni Suryani, Kasi Kuri kul um dan Penilaian SMP, dalam wawancara di Dinas Pendi di kan dan Kebudayaan Rejang Lebong, 12 Juni 2023, ijin kutipan telah di berikan.

Dari informasi yang telah penulis peroleh, dapat dijelaskan bahwa bentuk kebijakan yang telah diberikan adalah Peraturan Bupati yang menyatakan tentang pelaksanaan Kurikulum Merdeka, diberikan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan sekarang merancang untuk tidak lagi menggunakan Kurikulum 13. Informasi lainnya yaitu

‘Pemerintah memberikan dukungan penuh dengan menetapkan regulasi untuk sekolah-sekolah yang lulus dalam mengikuti Kurikulum Merdeka. Dan juga sekolah yang menjadi penggerak mendapatkan bantuan anggaran, yang dikenal dengan nama BOS Kinerja. Dan pemerintah Pusat juga sudah melakukan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Pemerintah Daerah terkait kelanjutan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), yang akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah’.^{6 5}

Sementara itu, Kepala Sekolah yang lain menuturkan:

‘Pemerintah selalu rutin melaksanakan lokakarya ataupun pelatihan, agar Sekolah Penggerak dapat mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan baik. Juga adanya evaluasi. Pemerintah mengimbau pada Pemdab agar mendukung penuh sekolah yang melaksanakan Kurikulum Merdeka. Dan Pemdab Kabupaten Rejang Lebong sendiri ternyata sangat mendukung hal tersebut. Terbukti dengan diberikannya *reward* dari Pemerintah Pusat kepada Bupati Rejang Lebong, sebab komitmen tidak melakukan mutasi jabatan kepada Kepala Sekolah yang lulus sebagai Sekolah Penggerak. Pemerintah juga mendukung dalam

^{6 5} Bizabeth Indri, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMPN 4 Rejang Lebong dalam wawancara di SMPN 4 Rejang Lebong, 16 Juni 2023, ijin kutipan telah diberikan

segi anggaran dengan adanya BOS Kinerja yang di salurkan kepada Sekolah Penggerak.⁶⁶

Sementara itu Kepala Sekolah lain menyatakan:

‘‘Kebijakannya dengan membuat regulasi dan memberikan bantuan BOS Kinerja, serta adanya bimbingan dan pelatihan’’.⁶⁷

2. Kesiapan Sekolah terhadap Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka adalah struktur baru dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Oleh sebab itu, tidak semua sekolah dapat menerima dan melaksanakan dengan baik. Dikutip dari pernyataan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, yang menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka dapat diterapkan di semua satuan daerah dengan berbagai kondisi. Kurikulum Merdeka ini juga dapat dan harus disesuaikan

⁶⁶ Winudin, Kepala Sekolah SMPN 7 Rejang Lebong, dalam wawancara di SMPN 7 Rejang Lebong, 14 Juni 2023, ijin kutipan telah diberikan.

⁶⁷ Henry Holoman, Kepala SMPN 23 Rejang Lebong, dalam wawancara di SMPN 23 Rejang Lebong, 19 Juni 2023, ijin kutipan telah diberikan.

dengan fasilitas yang dimiliki, visi misi sekolah, serta sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.

Satuan Pendidikan bisa melakukan pendaftaran untuk mencoba mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Kemendikbudristek memberikan dukungan pembelajaran dan pendataan Kurikulum Merdeka secara mandiri. Dimana dari hasil pendataan tersebut akan didapatkan calon satuan Pendidikan yang berminat dan mereka akan memperoleh pendampingan pembelajaran untuk implementasi Kurikulum Merdeka Jalur Mandiri.

Setelah pendataan, Kemendikbudristek akan memberikan angket kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka kepada satuan Pendidikan yang berminat. Isi dari angket itu tidak ada salah atau benar. Angket tersebut hanya untuk mengetahui pilihan mana yang cocok dengan kesiapan dan keadaan satuan Pendidikan. Sekolah yang ingin melaksanakan kurikulum ini pun tidak memiliki kriteria tertentu. Kriteria untuk menerapkan kurikulum ini hanya ada satu, yakni adanya motivasi dan berminat menerapkan kurikulum untuk memperbaiki pembelajaran.^{6 8}

Untuk mendapat gambarnya, dilakukan wawancara kepada sumber, yaitu para Kepala Sekolah yang telah menjadi Sekolah Penggerak dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka.

^{6 8} Ana Mil yana, *Ini Kriteria Sekolah yang Dapat Menerapkan Kurikulum Merdeka*, <https://www.ainamilyana.com/2022/01/ini-kriteria-sekolah-yang-boleh-hit/#:~:text=Lalu%20apa%20kriteria%20bagi%20sekolah,kurikulum%20prototipe%20untuk%20memperbaiki%20pembelajaran>. (di akses tanggal 10 Juli 2023)

Untuk melihat kesiapan sekolah, maka penulis melanjutkan dengan mengobservasi ke beberapa sekolah, diperoleh bahwa faktor pendukung SMP 23 Rejang Lebong melaksanakan Kurikulum Merdeka adalah bantuan BOS Kinerja, dapat mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Seperti dapat memperbaiki listrik sekolah dan dapat memasang internet untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran.⁶⁹

Sementara itu kesiapan yang ada di SMPN 7 Rejang Lebong menyatakan pendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka adalah⁷⁰

- a) Sarana dan prasarana mendukung Kurikulum Merdeka dan kurikulum ini juga tidak memaksa ada uang, tapi dapat dimanfaatkan yang ada.
- b) Kurikulum Merdeka dapat memanfaatkan kearifan lokal dari lingkungan sekitar. Contohnya di lingkungan SMPN 7 Rejang Lebong ini rata-rata orang tuanya petani. Dan lingkungan sekolah juga memiliki banyak lahan kosong. Jadi sekolah dapat membentuk siswa agar dapat melakukan kegiatan pertanian. Dan pihak sekolah juga mendatangkan narasumber dari orang tua siswa, agar dapat membimbing siswa melakukan kegiatan pertanian.
- c) Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk BOS Kinerja yang terlebih dahulu diawali dengan membuat rencana kerja. Pada tahun pertama, dana yang dikucurkan lebih dari 100 juta, tahun kedua sebesar 70 juta dan tahun ketiga hanya sebesar 35 juta.

⁶⁹ Observasi di SMPN 23 Rejang Lebong tanggal 12 Juni 2023

⁷⁰ Observasi di SMPN 7 Rejang Lebong tanggal 16 Juni 2023

Agar diperoleh fakta yang benar, maka dilakukan juga observasi ke sekolah yang menyelenggarakan Kurikulum Merdeka, yaitu SMPN 4 Rejang Lebong. Dan diperoleh fakta bahwa faktor pendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka ini salah satunya yang dilakukan pemerintah adalah dengan selalu memonitor dan terus melakukan pembinaan secara rutin. Bahkan adanya juga bantuan berupa buku-buku pelajaran serta adanya pelatihan-pelatihan. Pemerintah juga menyiapkan aplikasi atau yang dikenal dengan nama PMM (Platform Merdeka Mengajar). Dimana melalui aplikasi tersebut seluruh sekolah penggerak dapat belajar dan saling berbagi.^{7 1}

Ke mudian observasi dilakukan juga pada SMPN 7 Rejang Lebong, dan diperoleh fakta bahwa hal-hal yang menjadi penghambat pelaksanaan Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut:^{7 2}

- a) Bahwa mindset intern sekolah menjadi penghambat, dalam hal ini SDM Pengajarnya. Dimana dalam pelaksanaan pembelajaran, guru masih memakai pola lama.
- b) Dalam hal teori, para guru mengerti dan paham tentang Kurikulum Merdeka. Tapi saat pengaplikasiannya, masih saja menggunakan pola lama.
- c) Para guru masih kurang dalam hal teknologi, tapi Kepala Sekolah SMPN 7 Rejang Lebong berkomitmen bahwa pada tahun ke-4 seluruh

^{7 1} Observasi di SMPN 4 Rejang Lebong tanggal 06 Juni 2023

^{7 2} Observasi di SMPN 7 Rejang Lebong tanggal 16 Juni 2023

tenaga pengajar sudah harus memiliki laptop dan bisa menggunakannya.

- d) Sekolah khawatir terkait penganggaran setelah memasuki tahun ke-4 pelaksanaan Kurikulum Merdeka, karena Pemerintah Pusat sudah tidak memberikan bantuan dana lagi. Dan jika hanya mengandalkan BOS Reguler, tidak akan mencukupi karena sekolah hanya memiliki siswa yang sedikit.

Kemudian, pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah, menurut beberapa Kepala Sekolah, salah satunya menurut Wakil Kepala Sekolah SMPN 4 Rejang Lebong, Hizabet h menyatakan bahwa:

‘‘Dengan di haruskannya sekolah yang terpilih menjadi Sekolah Penggerak untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, menjadikan sekolah lebih kreatif dan inovatif. Sehingga sekolah dapat melaksanakan panen hasil Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Pemerintah Pusat juga membimbing Sekolah Penggerak dan tidak lepas tangan. Terbukti dengan pemerintah memberikan bantuan dengan nama BOS Kinerja^{7 3}

Sedangkan menurut Henry Haloman Siregar, Kepala SMPN 23 Rejang Lebong, menyatakan bahwa Pemerintah sendiri terus melakukan motivasi serta dukungan dengan adanya panggilan untuk memonitor pelaksanaan kurikulum merdeka.^{7 4}

^{7 3} Hizabet h Indri, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMPN 4 Rejang Lebong dalam wawancara di SMPN 4 Rejang Lebong, 16 Juni 2023, ijin kutipan telah diberikan.

^{7 4} Henry Haloman, Kepala SMPN 23 Rejang Lebong dalam wawancara di SMPN 23 Rejang Lebong, 19 Juni 2023, ijin kutipan telah diberikan.

Untuk mendapatkan informasi terkait kekurangan dari kurikulum merdeka dilakukan wawancara kepada sekolah lain. Diperoleh informasi yaitu

‘Perintah Daerah konsekuen dalam melaksanakan instruksi dari Pusat, dengan tidak melakukan mutasi jabatan kepada Kepala Sekolah. Pemerintah Pusat sendiri rutin melaksanakan lokakarya serta mengevaluasi kinerja dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Pada tahun ketiga pelaksanaan Kurikulum Merdeka, baru ada 7 sekolah yang melaksanakan. Hal itu dikarenakan adanya ketakutan dari sekolah akan konsep Mandiri Belajar yang di gaungkan pemerintah. Kekhawatiran tersebut terkait soal pendanaan yang mungkin harus dicari secara mandiri oleh sekolah’.⁷⁵

Secara umum kesiapan Sekolah Menengah Pertama yang menjadi sekolah penggerak di Kabupaten Rejang Lebong, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Kesiapan satuan Pendidikan memahami panduan perencanaan kurikulum Merdeka

Satuan pendidikan telah menyiapkan dokumen perencanaan yang disebut dengan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang berisi tentang analisis terkait kondisi geografis, budaya di lingkungan masyarakat sekolah, visi dan misi sekolah, hingga tujuan sekolah.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara, Kepala SMPN 7 Rejang Lebong, dalam wawancara di SMPN 7 Rejang Lebong, 14 Juni 2023, ijin kutipan telah diberikan.

⁷⁶ Observasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 7 Agustus 2023

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang diberikan oleh Henry Haloman, Kepala SMPN 23 Rejang Lebong yang menyatakan bahwa sebelum melakukan usulan dana BOS Kinerja juga sekolah harus terlebih dahulu menyiapkan dokumen perencanaan terkait pelaksanaan kegiatan kurikulum Merdeka.⁷⁷

Perencanaan pembelajaran sendiri terdiri dari komponen:⁷⁸

- (1) Rencana Pembelajaran untuk ruang lingkup satuan Pendidikan, yang berupa Capaian Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran Intrakurikuler dan P5, serta Perencanaan prioritas satuan Pendidikan.
- (2) Rencana Pembelajaran untuk ruang lingkup Kelas. Yang terdiri dari RPP atau Modul Ajar (Intrakurikuler dan P5).

Kemudian baru dilanjutkan dengan Menyusun dokumen perencanaan Penganggaran Keuangan atau dinamakan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) yang disusun berdasarkan analisis raport mutu yang didapat dari hasil Asesmen Nasional (ANBK) yang dilaksanakan sekolah.⁷⁹

- b) Kesiapan satuan Pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka

Dalam hal kesiapan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa dari

⁷⁷ Henry Haloman, Kepala SMPN 23 Rejang Lebong dalam wawancara di SMPN 23 Rejang Lebong, 19 Juni 2023, ijin kutipan telah diberikan.

⁷⁸ Dokumentasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 7 Agustus 2023

⁷⁹ Dokumentasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 7 Agustus 2023

aspek Pembelajaran, sekolah menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru dengan model capaian pembelajaran yang lebih sederhana. Satuan pendidikan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, seperti mempersiapkan akses internet, listrik, dan teknologi penunjang pembelajaran seperti chromebook yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Akan tetapi sarana pendukung tersebut baru dapat disiapkan oleh sekolah setelah sekolah tersebut mendapatkan Bantuan Dana Operasional (BOS) Kinerja dari Pemerintah. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara yang dilakukan kepada Kepala SMPN 23 Rejang Lebong. Yang menyatakan bahwa,

‘‘Dengan adanya Bantuan Operasional Kinerja yang diberikan oleh Pemerintah, saya selaku kepala sekolah dapat memperbaiki listrik sekolah, dan dapat memasang jaringan internet guna menunjang pelaksanaan Kurikulum Merdeka.’’⁸⁰

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala SMPN 7 Rejang Lebong, yang menyatakan bahwa

‘‘BOS Kinerja yang diberikan oleh pemerintah sangat membantu dalam pelaksanaan P5, di mana dari dana tersebut sekolah dapat membeli alat dan bahan penunjang. Dalam hal ini sekolah SMPN 7 Rejang Lebong, banyak melakukan kegiatan P5 terkait pertanian. Di mana dalam melaksanakan kegiatan pertanian tersebut, dibutuhkan mulsa, pupuk dan juga bibit.’’

- c) Kesiapan satuan Pendidikan dalam penyediaan buku Teks, akses dan sumber-sumber belajar mandiri

⁸⁰ Henry Hiloman, Kepala SMPN 23 Rejang Lebong dalam wawancara di SMPN 23 Rejang Lebong 19 Juni 2023, ijin kutipan telah diberikan

Satuan pendidikan telah berupaya memenuhi ketersediaan buku teks kurikulum Merdeka tetapi rasio kecukupannya belum terpenuhi.

d) Aktivitas komunitas belajar.

Satuan pendidikan telah mengakses strategi dukungan yang telah disediakan dari webinar kurikulum Merdeka yang ada di Platform Merdeka Belajar. Akan tetapi tidak semua tenaga pendidikan dapat mengaksesnya, salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi terutama tenaga pendidikan yang sudah lanjut usia.

Hal tersebut tergambar dalam wawancara yang dilakukan kepada Kepala SMPN 7 Rejang Lebong, yang menyatakan bahwa

“ Masih banyak guru yang masih memanfaatkan tenaga tata usaha dalam menyiapkan modul pembelajaran yang dapat di sadur melalui Platform Merdeka Mengajar. Dikarenakan keterbatasan kemampuan dalam menggunakan teknologi.^{8 2}

^{8 1} Wawancara, Kepala SMPN 7 Rejang Lebong, dalam wawancara di SMPN 7 Rejang Lebong, 6 Agustus 2023, ijin kutipan telah diberikan

^{8 2} Wawancara, Kepala SMPN 7 Rejang Lebong, dalam wawancara di SMPN 7 Rejang Lebong, 14 Juni 2023, ijin kutipan telah diberikan

Keterbatasan kemampuan dalam penggunaan teknologi tersebut juga mempengaruhi tenaga pendidik dalam mengikuti aktivitas yang ada dalam komunitas belajar.

3. Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Kurikulum Merdeka

Untuk mendapatkan informasi terkait implementasi Kebijakan Pemerintah mengenai Kurikulum Merdeka di satuan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dilakukan wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong, di mana menurutnya Pemerintah Daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat selalu melakukan Audiensi dengan Perguruan Tinggi IAIN Curup, dalam persiapan menyelenggaraan Kurikulum Merdeka. Berdasarkan hasil wawancara kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong terkait implementasi dari kebijakan Pemerintah terkait Kurikulum Merdeka di tingkat SMP Kabupaten Rejang Lebong, dimulai dengan membaca Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yaitu:^{8 3}

- a) Penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa.
- b) Dari 13 komponen RPP yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, Langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran

^{8 3} Eni Suryani, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP, dalam wawancara di SMPN 4 Rejang Lebong 12 Juni 2023, ijin kutipan telah diberikan

(*assessment*) yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan sisanya hanya sebagai pelengkap.

- c) Sekolah, Kelompok Guru Mata Pelajaran dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru/ Masyarakat Guru Mata Pelajaran (KKG/ MGMP) dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk keberhasilan belajar siswa.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip Efisien, Efektif dan berorientasi pada siswa adalah:

- a) Efisien berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga.
- b) Efektif berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- c) Berorientasi pada murid berarti penulisan RPP dilakukan dengan memperhatikan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas.

RPP sendiri dapat dibuat dengan singkat, satu halaman juga bisa, tidak ada persyaratan jumlah halaman. Asalkan sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi kepada murid. Dan tidak ada juga standar baku untuk penulisan RPP. Guru bebas membuat, memilih, mengembangkan serta menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisien, efektif dan berorientasi pada siswa. Dan guru juga dapat memodifikasi format penyusunan RPP tersebut.

Dalam RPP yang dibuat harus memiliki syarat, yaitu^{8 4}

- a. Memiliki 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, serta penilaian pembelajaran (assessment). Dan komponen lainnya hanya sebagai pelengkap.
 - b. Tujuan dari pembelajaran dapat ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar murid. Kegiatan belajar dan assessment yang ada di RPP, ditulis secara efisien
-
- a. USBN diganti menjadi ujian assessment, hal itu dilakukan untuk menilai kompetensi siswa secara tertulis atau juga dapat menggunakan penilaian lain seperti penugasan.
 - b. Ujian Nasional dirubah menjadi assessment kompetensi minimum dan survei karakter. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memacu guru dan sekolah agar dapat *upgrade* mutu pembelajaran.
 - c. RPP pada Kurikulum Merdeka berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Dimana pada kurikulum sebelumnya, format RPP hanya mengikuti format pada umumnya. Sedangkan Kurikulum Merdeka ini memberikan keluasaan bagi guru agar dapat secara bebas memilih, membuat, menggunakan serta mengembangkan format RPP. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RPP adalah 3 komponen intinya,

^{8 4} Eni Suryani, 12 Juni 2023

^{8 5} Ufani Mulida, *Pengembangan Modul Ajar Berbasis Kurikulum Merdeka*, (Jurnal Tarbawi Vol. 5, 2022)

yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. RPP pada Kurikulum Merdeka ini dikenal dengan nama Modul Ajar.

Tujuan dari pengembangan Modul Ajar sendiri adalah untuk memperkaya perangkat pembelajaran yang dapat memandu guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas tertutup dan terbuka. Sebelum menyusun modul ajar, guru harus mengetahui strategi pengembangan modul ajar dan harus memenuhi dua syarat minimal. Yaitu memenuhi kriteria yang telah ada dan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar sesuai dengan prinsip pembelajaran dan asesmen.

Adapun kriteria modul ajar kurikulum merdeka sendiri, yaitu (1) Esensial, yaitu setiap mata pelajaran berkonsep melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin ilmu, (2) Menarik, bermakna, dan menantang yaitu guru dapat menumbuhkan minat siswa dan mengikut sertakan siswa secara aktif pada pembelajaran, (3) Relevan dan kontekstual yaitu berkaitan dengan unsur kognitif dengan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan kondisi waktu dan tempat siswa berada, (4) Berkesinambungan, yaitu kegiatan pembelajaran harus memiliki keterkaitan sesuai dengan fase belajar siswa.⁸⁶

Kemudian, implementasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah, menurut beberapa Kepala Sekolah, salah satunya menurut Wakil Kepala Sekolah SMPN 4 Rejang Lebong, Hizabeth menyatakan bahwa:

‘‘Dengan di haruskannya sekolah yang terpilih menjadi Sekolah Penggerak untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka,

⁸⁶ Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong

menjadikan sekolah lebih kreatif dan inovatif. Sehingga sekolah dapat melaksanakan panen hasil Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Pemerintah Pusat juga membiayai Sekolah Penggerak dan tidak lepas tangan. Terbukti dengan pemerintah memberikan bantuan dengan nama BOS Kinerja.⁸⁷

Sementara itu, menurut Waminudin, Kepala SMPN 7 Rejang Lebong mengenai implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah, bahwa Pemerintah terus melakukan lokakarya, adanya suntikan dana dalam bentuk BOS Kinerja, serta adanya regulasi yang menetapkan tentang Sekolah Penggerak.

Sedangkan menurut Henri Haloman Siregar, Kepala SMPN 23 Rejang Lebong menyatakan bahwa Pemerintah sendiri terus melakukan motivasi serta dukungan dengan adanya panggilan untuk memonitor pelaksanaan kurikulum merdeka.⁸⁸

Untuk mendapatkan jawaban lain guna memastikan kebenaran dari informasi dan fakta yang sudah diperoleh, dilakukan wawancara kepada sekolah lain. Diperoleh informasi yaitu

‘Pemerintah Daerah konsekuen dalam melaksanakan instruksi dari Pusat, dengan tidak melakukan mutasi jabatan kepada Kepala Sekolah. Pemerintah Pusat sendiri rutin melaksanakan lokakarya serta mengevaluasi kinerja dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Pada tahun ketiga pelaksanaan Kurikulum Merdeka, baru ada 7 sekolah yang melaksanakan. Hal itu dikarenakan adanya ketakutan dari sekolah akan konsep Mandiri Belajar yang diganggu pemerintah. Kekhawatiran tersebut terkait soal

⁸⁷ Elizabeth Indri, 16 Juni 2023

⁸⁸ Henry Haloman, 19 Juni 2023

pendanaan yang mungkin harus dicari secara mandiri oleh sekolah.⁸⁹

- 1) Penguatan pe maha man terkait perencanaan dan pelaksanaan i mple mēnt asi kuri kul um

Pe maha man akan perencanaan i mple mēnt asi kuri kul um Merdeka meliputi penyusunan dan pengembangan kuri kul um penyelenggaraan satuan Pendi dik, al ur tujan pe mbel ajaran, dan modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sedangkan aspek pelaksanaan meliputi pelaksanaan ases mēn awal pe mbel ajaran dan pe mbel ajaran ber diferensi asi. Penguatan tersebut bisa dilakukan dengan mēngopti nal kan sumber belajar yang di sedi akan Ke mēndi kbudri stek, yaitu P MM dan seri webi nar, serta mēngaktifkan ko munitas belajar sebagai ruang unt uk ber di skusi dan ber bagi dal a m merencanakan dan mērefleksi kan i mple mēnt asi Kuri kul um Merdeka.

- 2) Di harapkan satuan pendi dik pelaksana kuri kul um Merdeka dapat me mēnuhi kebut uhan rasi o buku per sis wa.

Sal ah satu bahan ajar kunci dal a m pe mbel ajaran kuri kul um Merdeka adalah buku teks, sehing ga pe mēnuhannya unt uk setiap sis wa mēnjadi keharusan dan ditegaskan dal a m UU Sistem Pe mbukuan. Oleh karena itu di perlukan unt uk mēnsosi alisasi kan kebut uhan buku teks kuri kul um Merdeka sesuai jenjang dan jenis

⁸⁹ Wā mi nudi n, 14 Juni 2023

⁹⁰ Pusat Standar dan Kebijakan Pendi dik, 2023

Pendidikan. Serta mendorong Dinas Pendidikan untuk memastikan setiap sekolah telah mengalokasikan pembelian buku teks kurikulum Merdeka. Dan buku teks versi digital juga dapat menjadi alternatif jika sekolah belum menyediakan buku teks kurikulum Merdeka.

- 3) Agar diberdayakan sumber-sumber belajar mandiri, seperti PMM dan seri webinar perlu ditingkatkan

Akses terhadap PPM dan seri webinar relative meningkat jika dibandingkan di masa awal pendaftaran pelaksana Kurikulum Merdeka jalur mandiri. Namun, akses terhadap PPM dan seri webinar tersebut belum focus pada pembelajaran mandiri untuk memahami konsep, panduan, dan pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Hal itu terlihat dari rendahnya keikutsertaan satuan pendidikan yang mengakses topik-topik kunci dalam PPM serta seri webinar yang diikuti.

- 4) Mengoptimalkan aktivitas dan peran komunitas belajar dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka

Keaktifan satuan Pendidikan dalam komunitas belajar dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Namun, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada daerah yang belum banyak memiliki komunitas yang aktif. Hal tersebut penting karena komunitas belajar memiliki potensi sebagai media belajar bagi kepala satuan Pendidikan dan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan menumbuhkan kebiasaan belajar secara mandiri.

- 5) Agar Ke mendidri budri stek dan UPT me mperkuat ko muni kasi dengan Pe meri ntah Daerah terkait penda mpi ngan I mple me ntasi Kuri kul um Mer deka di daerah

Pel ati han dan penda mpi ngan yang di lakukan UPT Ke mendidri bud dan Di nas Pendi di kan dapat focus me mbantu satuan Pendi di kan yang kesulitan dal a m me nerapkan Kuri kul um Mer deka.

- 6) Refleksi berkala unt uk penerapan kuri kul um berjal an bai k dan persoalan di lapangan dapat segera di atasi

Refleksi yang di maksud dapat di lakukan me lalui i nstrument ases men mandiri maupun refleksi berkala ant ara UPT Ke mendidri bud dengan Di nas Pendi di kan. Me lalui refleksi tersebut di harapkan berbagai persoalan yang muncul dapat segera di atasi.

C Pembahasan

Kebijakan Kuri kul um Mer deka me rupakan kebijakan nasi onal yang di kel uarkan oleh Pe meri ntah Indonesi a pada tahun 2020. Kebijakan tersebut bert ujuan unt uk me mberi kebebasan pada sekolah dan guru dal a m me nge mbangkan kuri kul um sesuai dengan kebutuhan sis wa dan li ngkungan sekolah, sehi ngga dapat me ni ngkat kan kualitas Pendi di kan di Indonesi a.

Beberapa poi n pert ing yang ada dal a m kebijakan Kuri kul um Mer deka ant ara lai n:

1. Kuri kul um yang fleksi bel dan adaptif. Kuri kul um i ni me mungki nkan sekolah dan guru unt uk me nge mbangkan kuri kul um yang fleksi bel dan adaptif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi set empat. Kuri kul um i ni

tidak lagi bersifat satu ukuran untuk semua, akan tetapi dapat disesuaikan dengan karakteristik dan potensi siswa serta kondisi lingkungan.

2. Pembelajaran yang mandiri dan kreatif. Pada kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang mandiri dan kreatif, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan untuk belajar secara mandiri dan menghasilkan karya-karya yang kreatif.
3. Penerapan teknologi. Kurikulum Merdeka juga memperkuat penerapan teknologi dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat mengakses informasi dan pengetahuan dengan lebih mudah dan cepat, serta dapat memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan karya-karya yang inovatif.
4. Dukungan dari berbagai pihak. Kebijakan kurikulum merdeka ini didukung oleh berbagai pihak, seperti guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan Kurikulum Merdeka dengan lebih baik.

Kemendikbudristek juga telah menerbitkan berbagai peraturan dan kebijakan terkait dengan Kurikulum Merdeka. Seperti Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2021 tentang Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Untuk pelaksanaan Kurikulum Merdeka, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti melakukan sosialisasi kebijakan ini kepada masyarakat dan *stakeholder* Pendidikan, memberikan pelatihan dan pengembangan

keterampilan bagi guru, menyediakan sumber daya pembelajaran yang memadai, serta melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan pelaksanaan Kurikulum Merdeka dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa Pemerintah telah menyiapkan regulasi tentang pelaksanaan Kurikulum Merdeka, memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja serta adanya bimbingan dan pelatihan. Dari dana bantuan yang diberikan tersebut juga digunakan oleh sekolah untuk pemasangan jaringan internet. Sekolah juga dapat memanfaatkan kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah. Tersedianya juga Platform Merdeka Mengajar, yang menjadi ruang untuk berbagi ilmu dan mencari inspirasi agar bisa menjadi lebih berinovasi. Adanya buku pelajaran tentang Kurikulum Merdeka dan adanya modul project.

Dalam kesiapan pelaksanaan kurikulum Merdeka, dapat di mulai dengan menyusun perencanaan kurikulum Merdeka, Pendi dik dapat melaksanakannya dengan pilihan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan sepenuhnya alur tujuan pembelajaran dan perencanaan pembelajaran
- 2) Mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan rencana pembelajaran berdasarkan contoh-contoh yang disediakan pemerintah
- 3) Menggunakan contoh yang disediakan

Satuan Pendidikan yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak telah memahami panduan perencanaan, dan telah mempersiapkan dokumen perencanaan sebelum melaksanakan kegiatan kurikulum Merdeka.

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan Kurikulum Merdeka di Indonesia, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan. Bahwa dengan memberikan kebebasan pada sekolah dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekolah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia.

2. Memperkuat pembelajaran yang mandiri dan kreatif. Bahwa kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang mandiri dan kreatif, sehingga membuat siswa dapat mengembangkan kemampuan untuk belajar secara mandiri dan menghasilkan karya-karya yang kreatif. Hal tersebut dapat membantu siswa untuk mengembangkan potensi diri mereka dengan lebih baik.
3. Memfasilitasi pengembangan keterampilan. Bahwa kurikulum ini menekankan pada pengembangan keterampilan. Seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Hal tersebut sangat penting dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks dan dinamis.
4. Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Kurikulum ini memungkinkan sekolah dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Dimana hal ini dapat membantu siswa untuk lebih mudah menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka.
5. Memperkuat penerapan teknologi. Dalam pembelajaran Kurikulum Merdeka juga dapat memperkuat penerapan teknologi dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat mengakses informasi dan pengetahuan dengan lebih mudah dan cepat, serta dapat memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan karya-karya yang inovatif.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pendidikan. Dengan memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan

kurikulum diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pendidikan. Hal tersebut dapat membantu memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat, serta dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dalam mendukung Pendidikan anak-anak mereka.

Secara keseluruhan, penerapan Kurikulum Merdeka dapat memberikan banyak manfaat bagi siswa, guru, sekolah dan masyarakat secara umum.

Meskipun Kurikulum Merdeka mempunyai banyak keuntungan, namun pelaksanaannya masih dihadapkan pada beberapa hambatan, seperti:

- a) Kurangnya pemahaman dan sosialisasi;
- b) Terbatasnya Sumber daya, seperti perangkat pembelajaran, sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik yang terampil dan berkompeten;
- c) Tantangan teknologi Kurikulum Merdeka membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, seperti jaringan internet yang cepat, perangkat lunak pembelajaran, dan media pembelajaran yang interaktif;
- d) Kesulitan dalam penilaian hasil belajar. Karena dalam kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang lebih mandiri dan kreatif, sehingga tidak selalu dapat diukur dengan cara-cara konvensional;
- e) Kurangnya dukungan orang tua dan masyarakat;
- f) Perbedaan situasi dan kondisi di daerah-daerah.

Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan Upaya-upaya yang komprehensif dari pemerintah, sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Upaya tersebut dapat berupa sosialisasi yang lebih intensif, pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga pendidik,

dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai, serta Upaya-upaya kolaboratif antar berbagai pihak yang terlibat.

A Kesimpulan

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Kebijakan Sekolah mengenai Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Rejang Lebong, menyimpulkan:

1. Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMP Kabupaten Rejang Lebong adalah meneruskan keputusan kepada Sekolah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka. Pemerintah juga tidak lepas tangan, dengan selalu meninjau, dan mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka tersebut melalui BPPM (Badan Penjamin Mutu Pendidikan). Dan pemerintah juga memberikan bantuan berupa Bantuan Operasional Sekolah yang dikenal dengan nama BOS Kinerja. Sedangkan Pemerintah Daerah sendiri, dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong telah menyiapkan draft regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Tahun 2024 nanti, di mana pada tahun 2024 tanggung jawab pelaksanaan bimbingan serta evaluasi tersebut akan di serahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya.
2. Kebijakan sekolah terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka, menunjukkan bahwa:
 - a) Dari segi pemahaman panduan perencanaan kurikulum Merdeka, satuan Pendidikan telah memahaminya. Hal tersebut ditunjukkan dengan telah

di siapkannya dokumen KSOP sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Visi misi serta tujuan sekolah juga dapat disiapkan oleh sekolah

- b) Dari segi kesiapan dalam pelaksanaan kurikulum menunjukkan bahwa dari dana Bantuan Operasional Kinerja yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah penggerak, dapat digunakan oleh sekolah untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kurikulum Merdeka. Baik itu dari memperbaiki listrik, menyiapkan jaringan internet, hingga menyediakan peralatan pendukung kegiatan P5.
 - c) Kesiapan sekolah dalam penyediaan buku teks, akses dan sumber-sumber belajar mandiri, menunjukkan bahwa sekolah masih menggunakan buku teks pembelajaran Kurikulum 13. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya buku teks yang beredar dan sekolah pun masih dalam tahap melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Di mana dalam pelaksanaan kurikulum tersebut masih menyadur dari kurikulum 13.
 - d) Aktivitas Komunitas Belajar, di mana dalam mengakses Komunitas Belajar yang terdapat di Platform Merdeka Mengajar masih minim aktivitas. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan tenaga pendidik dalam menggunakan teknologi.
3. Kebijakan pemerintah dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka terlihat dengan adanya program sekolah penggerak. Di mana dalam program tersebut, pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk bimbingan, evaluasi, dan berbagi praktik baik. Pemerintah juga memberikan kebijakan dengan

memberikan bantuan dana operasional yang dinamakan BOS Kinerja dalam mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka.

B Implikasi

Kurikulum Merdeka ini belum dilaksanakan pada semua sekolah, oleh sebab itu hasil penelitian dapat dipertimbangkan oleh satuan-satuan Pendidikan yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka. Sehingga dapat mempersiapkan satuan pendidikan dengan baik jika sudah ditetapkan untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka.

C Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat penulis sarankan:

1. Kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong untuk dapat mengupayakan membantu Pemerintah Daerah untuk meneruskan pelatihan, lokakarya dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah perintis/ penggerak serta menyiapkan penganggaran guna menunjang pelaksanaan kurikulum Merdeka ketika telah menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Daerah.
2. Kepada Sekolah Penggerak yang ditunjuk untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka, diharapkan untuk berusaha maksimal memenuhi atau mencapai tujuan Kurikulum Merdeka dengan cara melaksanakan Kurikulum Merdeka dengan sebaik-baiknya.

3. Kepada pihak IAIN Curup yang menjadi tempat berkoordinasi untuk pelaksanaan Kurikulum Merdeka, agar dapat mengupayakan membantu dalam melaksanakan pendampingan terhadap sekolah-sekolah penggerak.

Abdul Khaliq Fari d. 2005. *Fiqh Politik Islam* terjemahan Fatmahan A Hamid, Jakarta: Anzah

Ah madi, Abu. 1991. *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: R neka G pta

Ai na mul yana, *Ini Kriteria Sekolah yang Dapat Menerapkan Kurikulum Merdeka*,
<https://www.ainamul yana.com/2022/01/ini-kriteria-sekolah-yang-boleh.html>

Aulia Sulkipli, Nirapni. *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar terhadap Prestasi Siswa pada SMP Negeri 1 Makassar*,
<https://repository.uni bos.ac.id/xm ui/bitstream/handle/123456789/5829/2023%20NURAPN%20AULIA%20SULKIPLI%204620104052.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Azi z, Abd. 2010. *Orientasi Sistem Pendidikan Agama di Sekolah*, Yogyakarta: Teras

Badan Standar, Kurikulum dan Ases men Pendidikan. 2022. *Tahapan Implementasi Kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan*. Jakarta: Ke men di kbudri stek

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

DP MPTSP, *Peta Administrasi Kabupaten Rejang Lebong*,
https://dpmptsp.rejanglebongkab.go.id/22853335_119701312129375_311142662860222011/

Efyant o, Dwi. *Analisis Kebijakan Merdeka Belajar pada Kurikulum SMK*,
<https://epri nts.umm.ac.id/82007/1/TESIS-DW%20EFYANTO.pdf>

Hadi, Anr ul dkk. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia

Hadi ansah, Deni. 2022. *Implementasi Program GLS Dalam Memperkuat Ekosistem Sekolah Literat Pada SMP Nugraha Kota Bandung. Disertasi Sekolah Pascasarjana UNINUS*

Hadi, Sutisno. 2010. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit UGM
Iw nсах. 2020. *Menakar Konsep Merdeka Belajar*. Intens News. Available at:
<https://intens.news/menakar-konsep-merdeka-belajar/>

J. Mbelong Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja

Rosdakar ya

Ke mendi kbud. 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka* Edis ke-3, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdi kbud RI

Komarudin, Yooke Tjupar mah. 2010. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara

Mulyadi. 2015. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka

Nasution, S 1991. *Pengembangan Kurikulum* Bandung: Gtra Aditya Bakti

Nizar, Sya msul. 2002. *Filsafat Pendidikan Islam* Jakarta: Gputat Pers

Nurchaili. Vol 16. *Membentuk Karakter Siswa Melalui Keteladanan Guru*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan

Nur Fuad, Ahmad dkk. 2010. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam* Malang: Mhdani

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, *Belajar Melalui Refleksi Kesiapan Implementasi Kurikulum Merdeka: Seberapa Siap Satuan Pendidikan Melakukan Perubahan?*,
https://pskp.kemdi.kbud.go.id/assets/front/images/produk/1-gtk/kebijakan/Risalah_Kebijakan_PSKP_No_6_September_2022_Refleksi_Kesiapan_Implementasi_Kurikulum_Merdeka.pdf

Rahayu, Restu dkk. *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak*, Jurnal Basicedu, <https://jbasic.or.gi/index.php/basicedu/article/view/3237/pdf>
Rahimah, R 2022. *Peningkatan Kemampuan Guru SMP Negeri 10 Kota Tebingtinggi Dalam Menyusun Modul Ajar Kurikulum Merdeka melalui Kegiatan Pendampingan Tahun Ajaran 2021/2022*. ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam

Rahmadayanti, Dewi. *Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar*, Jurnal Basicedu

Sari, Merta NKL 2021. *Pengembangan Bahan Ajar Embroidery Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka*, Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Method*, Bandung: Alfabeta

Suharsimi, Ari kunt o. 2010. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Gupta

Suryani, Novrita. *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak SMAN 10 Kota Jambi*,
<https://repository.unja.ac.id/43253/1/ABSTRAK%20%281%29.pdf>

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Jakarta: Grasindo

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Gtra Unbar

Yoru Media. *Pengertian Kurikulum Merdeka Belajar, Latar Belakang, Keunggulan dan Perbedaan dengan Kurikulum Sebelumnya*.
<https://www.yoru.my.id/2022/02/pengertian-kurikulum-merdeka-dan-keunggulannya.html>

Widyaiswara, Kusnohadi. 2020. *Esensi Merdeka Belajar yang Sebenarnya*, LPM
Jawa Timur



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/327 /IP/DPMPTSP/VI/2023

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 - Surat Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 070/316/Bid.III/BKBP/2023 tanggal 15 Juni 2023 Hal Rekomendasi Penelitian.
 - Surat dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 163/In.34/PCS/PP.00.9/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Feti Iin Farlina / Palembang, 02 Mei 1991
NIM : 21861008
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI) / Tarbiyah
Judul Proposal Penelitian : Analisis Kebijakan Pemerintah dan Kesiapan Sekolah Mengenai Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Rejang Lebong
Lokasi Penelitian : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Rejang Lebong dan Sekolah Menengah Pertama yang melakukan Kurikulum Merdeka
Waktu Penelitian : 19 Juni 2023 s/d 28 Agustus 2023
Penanggung Jawab : Direktur Program Pascasarjana IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 19 Juni 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



Tembusan :

- Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
- Direktur Program Pascasarjana IAIN Curup
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong
- Kepala Sekolah Menengah Pertama yang Melakukan Kurikulum Merdeka
- Yang Bersangkutan
- Arsip



PEMERINTAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 4 REJANG LEBONG
SEKOLAH ADIWIYATA AKREDITASI "A"
Jalan Perbo Curup Utara Tlp. 0732-23165 e-mail : smpn1cu@gmail.com



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 421.3 / 216 / PL / SMPN 4 RL / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SMP Negeri 4 Rejang Lebong, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : FETI IIN PARLINA
Tempat Tanggal lahir : Palembang, 02 Mei 1991
NIM : 21861008
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)/Tarbiyah
Tempat Penelitian : SMPN 4 Rejang Lebong
Jadwal Penelitian : 19 Juni 2023 s/d 28 Agustus 2023

Nama tersebut diatas adalah benar-benar telah melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul "**Analisis Kebijakan Pemerintah dan Kesiapan Sekolah Mengenai Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Rejang Lebong**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 2023
Kepala Sekolah

PARIDA ARIANI, S.Sos. M.Pd
NIP. 19920610 199203 2 007





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 23 REJANG LEBONG
Alamat: Jalan Raya IV Suku Menanfi Kecamatan Sindang Dataran Kode Pos 39154

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 421.3/028/DS/SMPN23/RL/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,:

Nama : HENRI HALOMOAN SIREGAR, M.Pd
NIP : 19801011 201001 1 016
Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan bahwa :

Nama : Feti Iin Parlina, S.Pd.I
NIM : 21861008
Fakultas / Jurusan : Tarbiyah/ Manajemen Pendidikan
Judul Tesis : Analisis Kebijakan Pemerintah dan Kesiapan Sekolah Mengenai Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Rejang Lebong.

Telah selesai melaksanakan penelitian di SMP Negeri 23 Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



2023
Ka. SMP Negeri 23 Rejang Lebong

HENRI HALOMOAN SIREGAR, M.Pd

NIP. 19801011 201001 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 7 REJANG LEBONG
Jl. Duku Ulu Kec. Curup Timur Telp. (0732) 21518

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 421.3/578/PL/SMPN.7/RL/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,:

Nama : **WAMINUDIN, M.Pd**
NIP : 19731206 200502 1 001
Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan bahwa :

Nama : Feti Iin Parlina, S.Pd.I
NIM : 21861008
Fakultas / Jurusan : Tarbiyah/ Manajemen Pendidikan
Judul Tesis : Analisis Kebijakan Pemerintah dan Kesiapan Sekolah Mengenai Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Rejang Lebong.

Telah selesai melaksanakan penelitian di SMP Negeri 7 Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



2023
Ka. SMP Negeri 7 Rejang Lebong

WAMINUDIN, M.Pd
NIP. 19731206 200502 1 001

PANDUAN PENELITIAN

Judul : Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dan kesiapan sekolah mengenai pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar tingkat SMP Kabupaten Rejang Lebong.

Lokasi : SMP yang melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar

Nama : FETI IIN PARLINA

NIM : 21861008

Prodi : Manajemen Pendidikan Islam

No	VARIABEL	INDIKATOR	PERTANYAAN	TEKNIK	INFORMAN
	Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kesiapan Sekolah mengenai pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Rejang Lebong.	1. Kebijakan Pemerintah Daerah Rejang Lebong mengenai pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar	1.1. Apa saja kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam Kurikulum Merdeka di SMP Kabupaten Rejang Lebong? 1.2. Apa saja bentuk	- Wawancara - Observasi	- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rejang Lebong - Kasi. Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rejang

			kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam Kurikulum Merdeka di SMP Kabupaten Rejang Lebong?		Lebong - Kepala Sekolah
	2. Kesiapan sekolah dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar		2.1. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar? 2.2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar?	- Wawancara - Observasi	- Kepala Sekolah - Wakil Bagian Sarpras - Wakil Bagian Kurikulum
	3. Implementasi		3.1. Bagaimana	- Wawancara	- Kepala Sekolah


		kebijakan Pemerintah Daerah mengenai Kurikulum Merdeka Belajar di tingkat sekolah	implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Menengah Pertama?	- Observasi	- Wakil Sarpras - Wakil Bagian Kurikulum
--	--	--	---	-------------	--

PEDOMAN WAWANCARA

Informan :
Hari/ Tanggal :
Jabatan :
Paraf :

1. Apa saja kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMP Kabupaten Rejang Lebong?
2. Apa saja bentuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam Kurikulum Merdeka di SMP Kabupaten Rejang Lebong?
3. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar?
4. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar?
5. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di tingkat Sekolah Menengah Pertama?

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Eni Suryani, Mpd.
Hari/ Tanggal :
Jabatan : Kasj Kurikulum dan Penilaian SMP
Paraf : 

1. Apa saja kebijakan Pemerintah ~~Kabupaten Rejang Lebong~~ dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMP Kabupaten Rejang Lebong?

Pemerintah menyelenggarakan kegiatan Pendampingan melalui BPMP (Badan Penjamin Mutu Pendidikan).

Dan menyiapkan dana bantuan operasional Sekolah (BOS Kinerja) sebagai bentuk Reward dari Pemerintah kepada Sekolah yang berhasil lulus Seleksi sebagai Sekolah Penggerak.

Pemerintah juga membantu Sekolah dalam melakukan Lokakarya.

Pemerintah daerah sendiri dalam hal ini Dinas Pendidikan tidak lepas tangan meskipun pelaksanaannya masih menjadi wewenang pemerintah pusat.

2. Apa saja bentuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam Kurikulum Merdeka di SMP Kabupaten Rejang Lebong?

Pemerintah menghimbau agar pada tahun 2024, seluruh sekolah sudah beralih ke Kurikulum Merdeka semua.

Pemerintah Daerah sendiri mendukung. Dan sekarang sedang disatukan Peraturan Bupati yang membahas tentang pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

Dalam Perbup itu akan membahas tentang pembiayaan dan juga merantang agar sekolah dapat melaksanakan Kurikulum Merdeka Berbagi. Dimana sekolah tersebut tidak lagi menggunakan Kurikulum 13 dan murni menggunakan Kurikulum Merdeka. Dan sekolah dapat berbagi inspirasi dan motivasi kepada sekolah lain melalui Platform Merdeka Mengajar.

3. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar?

Pemerintah Daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat selalu melakukan Audiensi dengan Perguruan tinggi IAIN Cuhup, dalam persiapan menyelenggarakan kurikulum merdeka.


4. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar?

- Adanya ketakutan dari sekolah ~~bahwa~~ jika menjadi sekolah penggerak, maka sekolah dibuntak untuk melakukan pembiayaan setara mandiri. Sehingga di tahun ke-2 hanya ada 4 sekolah yang berani mengikuti kurikulum ini.
- Kurikulum Merdeka menuntut agar SDM nya mampu melaksanakan kurikulum ini dan mampu mengoperasikan komputer. Sedangkan di daerah kita masih lebih dari 70% tidak pahami IT.

5. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah ~~Daerah~~ tentang pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di tingkat Sekolah Menengah Pertama?

- Pemda menyusun Perbup.
- Pemerintah menyiapkan bantuan BOS Kinerja.

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Elizabeth Indri Hapsari S.Pd
Hari/Tanggal :
Jabatan : Wakil Kurikulum SMP 4 RL
Paraf : 

1. Apa saja kebijakan Pemerintah ~~Kabupaten Rejang Lebong~~ dalam

pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMP Kabupaten Rejang Lebong?

Sejak tahun 2021, setelah sekolah kami melaksanakan Kurikulum Merdeka. Pemerintah rutin melaksanakan pelatihan dan evaluasi. Atau yang sering disebut dengan PMO (Project Management Office). Evaluasi itu dilakukan satu kali dalam sebulan.

Pelatih, Pembimbing dan evaluasi dilakukan oleh perwakilan dari pemerintah pusat.

Sedangkan Pemerintah Daerah hanya sebatas memberikan dukungan. Karena pelaksanaan kurikulum Merdeka ini masih menjadi wewenang pemerintah pusat.

2. Apa saja bentuk kebijakan Pemerintah ~~Kabupaten Rejang Lebong~~ dalam

Kurikulum Merdeka di SMP Kabupaten Rejang Lebong?

Pemerintah memberikan dukungan penuh. Pengan menetapkan regulasi untuk sekolah - sekolah yang lulus dalam mengikuti kurikulum merdeka.

Dan juga sekolah yang menjadi penggerak, mendapatkan bantuan anggaran, yang dikenal dengan nama BOS Kinerja.

Dan pemerintah pusat juga sudah melakukan perjanjian kerjasama (MoU) dengan pemerintah Daerah terkait kelanjutan implementasi kurikulum Merdeka (IKM), yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah.

3. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar?

Faktor pendukung Pelaksanaan Kurikulum Merdeka ini salah satunya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan selalu memonitor dan terus melakukan Pembinaan Setara rutin.

Bahkan juga adabantuan buku-buku Pelajaran, serta adanya pelatihan-pelatihan.

Pemerintah juga menyiapkan Aplikasi atau yang dikenal dengan nama PMM (platform Merdeka Mengajar), dimana melalui aplikasi tersebut seluruh sekolah penggerak dapat belajar dan saling berbagi.

4. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar?

Salah satu yang menjadi penghambat adalah dikarenakan kegiatan kurikulum Merdeka ini masih dipegang oleh Pemerintah Pusat secara utuh.

Sehingga apabila terbentur, atau terdapat masalah, maka sekolah harus mencari solusi sendiri. Baik itu melalui website ataupun juga melalui Platform Merdeka Mengajar.

Lalu materi-materi juga sangat mengandalkan Teknologi, sehingga sangat menyulitkan untuk guru-guru yang sudah lanjut usia.

Serta sarana dan prasarana sendiri masih kurang memadai.

Anak murid juga terdampak karena tidak adanya kuota internet. Bahkan ada anak yang tidak mempunyai HP Android.

5. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di tingkat Sekolah Menengah Pertama?

Dengan dihuskanya sekolah yang terpilih menjadi Sekolah Penggerak untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, menjadikan sekolah lebih kreatif dan inovatif. Sehingga sekolah dapat melaksanakan Pameran Hasil Proyek Penguatan profil Pelajar Pancasila (PP5).

Pemerintah pusat juga terus membimbing sekolah Penggerak dan tidak lepas tangan, terbukti dengan pemerintah memberikan bantuan dengan nama BOS Kinerja.